

**PENDIDIKAN KEWARGAAN BERBASIS
MASYARAKAT**

PENDIDIKAN KEWARGAAN BERBASIS MASYARAKAT

Tim Penyusun



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

**UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
2015**

PENDIDIKAN KEWARGAAN BERBASIS MASYARAKAT

Diterbitkan oleh SILE/LLD UIN Sunan Ampel Surabaya
15 x 23 cm, x + 118 hlm.
ISBN:

Tim Penulis Eni Purwati
 Kunawi Basir
 Muhammad Helmi Umam
 Nadhir Salahuddin
 M. Fathoni Hakim
 Dahkelan
 Hikmah Bafaqih

Penyunting Sulanam
Penyelaras Nadhir Salahuddin

Cetakan I Desember 2015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar	x
Bagian Kesatu: Pendahuluan	1
Urgensi Pendidikan Kewargaan Berbasis Masyarakat.....	2
Memahami pendidikan Kewargaan.....	2
Memahami Isi Buku	4
Bagian Kedua: Panduan Pendidikan Kewargaan.....	7
Konsep dan Karakteristik Pendidikan Kewargaan.....	8
Konsep Pendidikan Kewargaan Merbasis Masyarakat.....	8
Karakteristik Pendidikan Kewargaan.....	11
Pendekatan, Wahana, dan Teknik Pendidikan Kewargaan	17
Pendekatan Pendidikan Kewargaan	17
Wahana Pendidikan Kewargaan	20
Teknik Pendidikan Kewargaan.....	26
Bagian Ketiga: Praktik Pendidikan Kewargaan Berba-	
 sis Masyarakat	29
Layanan Dasar Pendidikan; Dari Masyarakat Untuk Masya-	
rakat.....	30
Pengantar	30

Tujuan	31
Target Perubahan yang Diharapkan.....	31
Peserta.....	32
Pendekatan dan Wahana.....	32
Teknik Penyampaian.....	32
Materi: Layanan Pendidikan Dasar di Indonesia.....	33
Refleksi	36
Sekolah Inklusi, Alternatif Pembelajaran Paripurna	37
Pengantar	37
Tujuan	38
Peserta.....	38
Pendekatan dan Wahana.....	39
Pokok Bahasan.....	39
Teknik Pembelajaran	39
Materi: Pendidikan Inklusi.....	41
Refleksi	49
Sadar Layanan Ekonomi Lokal dan Potensi Aset yang Tersedia.....	50
Pengantar	50
Tujuan	53
Kata kunci.....	54
Materi: Sadar Layanan Ekonomi Lokal dan Potensi Aset ..	54
Langkah Kegiatan	55
Figur Desa.....	58
Kegiatan Refleksi	58
Keterbukaan Akses Ekonomi Bagi Masyarakat	61
Pengantar	61
Tujuan	62
Tehnik Penyampaian.....	62
Pendekatan dan Wahana.....	62
Materi: Keterbukaan Akses Ekonomi.....	63
Refleksi	64
Transparansi Anggaran Dan Gerakan Anti Korupsi	67
Pengantar	67

Tujuan	68
Pendekatan dan Wahana.....	69
Teknik Penyampaian.....	69
Materi: Transparansi Anggaran dan Gerakan Anti Ko- rupsi.....	70
Refleksi	79
Pemilu dan Budaya Sengketa.....	81
Pengantar	81
Mengurai Pemilu; Mengurai Rutinitas ‘Pilu’	82
Tiga Kerangka Pemilu di Indonesia.....	83
Tiga Strategi untuk Harmoni	87
Refleksi	89
Reformasi Hukum dan Diskriminasi Perempuan di Indonesia. 91	
Pengantar	91
Tujuan	92
Pendekatan dan Wahana.....	93
Teknik Penyampaian.....	93
Materi: Reformasi Hukum dan Diskriminasi Perempuan..	93
Refleksi	97
Keadilan Sosial dan Keadilan Hukum	99
Pengantar	99
Tujuan dan Target.....	100
Pendekatan dan Wahana.....	100
Teknik Penyampaian.....	100
Materi: Apa yang Dimaksud dengan Keadilan Sosial?	101
Refleksi	103
“Kota Lambat” dan Kepedulian Lingkungan.....	105
Pengantar	105
Kota Santai, Kotanya Manusia	107
Kemungkinan Inisiasi <i>Cittaslow</i> di Indonesia.....	110
Refleksi	112
Daftar Bacaan.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Konsep Pendidikan Kewargaan Berbasis Masyarakat.....	10
Tabel 2	: Perbandingan 3 Karakteristik Pendidikan Kewargaan	11
Tabel 3	: Peta Berbagi secara Gotong Royong.....	57
Tabel 4	: Peta Surga dan Bumi.....	58
Tabel 5	: Proliferasi Pasal-Pasal Hak Asasi Manusia Pasca Amandemen UUD 1945.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan layanan pendidikan	30
Gambar 2: Teknik Advokasi Layanan Pendidikan Dasar.....	33
Gambar 3: Persentase Angka Melek Huruf Indonesia Tahun 2004 – 2013.	34
Gambar 4: Contoh Arah Mata Angin.....	57
Gambar 5: Siklus Transparansi Informasi.....	71
Gambar 6: Contoh Wahana Transparansi Anggaran.....	74
Gambar 7: Dimensi Perwujudan Keadilan Sosial.....	102

Bagian Kesatu

P E N D A H U L U A N

URGENSI PENDIDIKAN KEWARGAAN BERBASIS MASYARAKAT

MEMAHAMI PENDIDIKAN KEWARGAAN

Serangan terhadap World Trade Center (WTC) New York pada 11 September 2001 dianggap sebagai bukti konkret, dan sekaligus membenarkan tesis Samuel Huntington tentang perang peradaban. Tragedi tersebut menambah masalah besar di Indonesia baik dalam hal kehidupan keagamaan, politik, sosial, dan budaya yang semua itu akan memicu ketidak pastian bagi masyarakat sipil untuk menuju gelombang demokrasi di Indonesia

Searah perjalanan wacana demokrasi di Indonesia, maka pendidikan kewargaan (*civic education*) pun mulai mencuat karena ketika Indonesia memasuki babak baru reformasi kehidupan berbangsa dan bernegara, munculnya gejolak politik dan ekonomi yang berujung pada konflik sosial semakin menjauhkan Indonesia sebagai negara yang damai dan makmur perlu dipertanyakan. Sumber mendasar dari konflik-tersebut memusat pada dua unsur yakni etnisitas dan agama. Melalui keduanya masyarakat saling mengidentifikasi diri dan menjadikan mereka merasa berbeda satu sama lain. Dalam pada ini, garis-garis pemisah antarbudaya (*cultural fault lines*) menjadi garis pertentangan yang amat mendasar. Dalam relasi kebudayaan yang

penuh ketegangan itulah agama menjadi salah satu unsur pembeda paling determinan.

Dalam banyak hal kasus kekerasan konflikual tersebut, khususnya semenjak runtuhnya rezim Orde Baru misalnya, anasir interes politik memang terlibat, tetapi konflik umumnya semakin membesar ketika sentimen etnis dan agama turut dimainkan. Khusus pada sentimen keagamaan. Agama memang bukan satu-satunya faktor dalam banyak kasus pertikaian atau kekerasan, tetapi konsiderasi keagamaan senantiasa ada dan sangat menentukan.

Di samping masalah politik, budaya dan juga agama, masalah perempuan (gander) tampaknya menjadi persoalan yang memerlukan penanganan dalam upaya pencarian solusi bagi keberadaannya. Karena pada waktu itu secara sosial-budaya perempuan menjadi komunitas yang dirugikan oleh tradisi dan selalu dijustifikasi keagamaan untuk melestarikan relasi *status quo*. Sebaliknya kaum laki-laki semakin diperkokoh oleh argumen-argumen tradisi dan dasar tradisi keagamaannya. Karena pada waktu itu (2000-an) kondisi politik dan sosial budaya tidak menentu, maka dunia perempuan (gander) tidak bisa menunjukkan aktifitasnya baik dalam ranah politik maupun dalam ranah budaya. Maka dengan pendidikan civic education diharapkan masyarakat akan bisa melihat bahwa hubungan laki-laki dan perempuan mulai dari rumah tangga (*domestic*) hingga dunia kerja (*public*) dilihat sebagai sesuatu yang natural (*taken for granted*) dan tidak dilihat sebagai sesuatu yang aneh untuk dipersoalkan.

Di samping keadilan gander cita-cita pendidikan civic yang tidak kalah pentingnya adalah bertumbuhnya pemerintah yang demokratis (*democratic governance*) seperti, kehidupan warga negara yang melindungi hak-hak kebebasan, kesetaraan di depan hukum bagi semua warga negara, kepastian konstitusional yang mengatur wewenang negara dan warga negara, jaminan dalam pengelolaan kekuasaan oleh pemerintah agar terbuka, adil dan

jujur, toleransi dalam situasi keragaman, dan adanya kebebasan dalam berkepercayaan dan beragama.

Pendidikan kewargaan adalah *Citizenship Education* yang memberikan tekanan pada proses-proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warga negara dalam masyarakat madani. Pandangan lain mengatakan bahwa pendidikan kewargaan mencakup pengetahuan tentang lembaga-lembaga dan sistem yang terdapat dalam pemerintahan, warisan politik, proses-proses demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, administrasi publik dan sistem hukum. Sebagian yang lain menyebut bahwa pendidikan kewargaan adalah mencakup wilayah keadilan sosial, kesadaran terhadap lintas budaya dan kelestarian lingkungan hidup.

Melihat definisi tersebut di atas, maka buku yang disusun oleh beberapa tenaga edukatif (dosen) dan praktisi sosial ini mempunyai tujuan agar masyarakat lebih tahu dan sadar tentang pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menyangga, memelihara dan melestarikan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian tentu perlu adanya pendidikan karakter yang tidak hanya berkutat pada ranah kognitif saja akan tetapi lebih ditekankan pada ranah afektif dan psikomotorik yang berbasis pada masyarakat.

MEMAHAMI ISI BUKU

Buku ini berbeda dengan buku civic yang lain karena buku-buku pendidikan civic selama ini hanya berkutat pada wilayah akademik yakni hanya memuat kajian-kajian ilmiah tentang wacana demokrasi dan pendidikan kewarganegaraan, hal semacam ini akan memicu pada pembaca dalam belbagai penafsiran tentang wacana yang disuguhkan yang akhirnya terjadi perdebatan (perbedaan) dalam pemahaman dan penafsiran yang semua itu akan berujung pada gesekan-gesekan pemahaman teks dan konteks yang pada gilirannya justru akan menimbulkan konflik horisontal. Melalui pertimbangan seperti itu, maka isi buku ini

tidak berorientasi pada wilayah akademik (kognitif) saja, akan tetapi diarahkan pada wilayah pendidikan karakter yang demokratis yakni berorientasi pada ranah afektif dan psikomotorik dengan harapan para pengguna dan penggeliat masyarakat madani tidak disibukkan pada perbedaan wacana akan tetapi masyarakat sebagai aktor akan berperan aktif dan secara langsung akan terkonstruksi karakter yang beradab (*civilized*) sesuai dengan harapan masyarakat madani. Dengan demikian sasaran buku ini adalah masyarakat secara luas baik pemerintah maupun NGO yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat sipil (seperti: mahasiswa, mubaligh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, dan penggiat-penggiat masyarakat sipil yang lain).

Dalam rangka menumbuhkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai kewarganegaraan yang aktif di masyarakat sebagaimana tersebut di atas, maka pendekatan yang paling tepat digunakan adalah *Asset Based Community Development* (ABCD), karena ABCD ini merupakan pendekatan dalam pengembangan masyarakat yang mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial dimana masyarakat menjadi pelaku dan penentu upaya pembangunan di lingkungannya atau yang seringkali disebut dengan *Community Driven Development* (CDD). Upaya pengembangan *civil society* (masyarakat madani) harus dilaksanakan sejak dari awal menempatkan manusia untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatan yang dimiliki serta segenap potensi dan aset yang dipunyai yang paling potensial untuk dimanfaatkan. Hanya dengan mengetahui kekuatan dan aset diharapkan manusia mengetahui dan bersemangat untuk terlibat sebagai aktor dan oleh karenanya memiliki inisiatif dalam segala upaya perbaikan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan civic yang dilaksanakan masyarakat sendiri menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa warga masyarakat berkesempatan untuk turut serta sebagai penentu agenda perubahan yang sedang mereka hadapi. Maka wahana pendekatan yang harus dilalui dalam pendidikan civic ini adalah melalui wahana kekuasaan, dan

demokratis. Jalur kekuasaan misalnya melalui sosialisasi, penataran, iklan layanan masyarakat, kampanye pemilu. Sedang pendekatan demokratis melalui cerita, dongeng, pembiasaan, dialog warga, pelatihan-pelatihan (seperti: pelatihan advokasi, pelatihan survey kepuasan layanan masyarakat), diskusi komunitas, pendampingan pemberdayaan masyarakat (*Community Based Research*) seperti audit sosial, budget tracking, civic report card, indeks penilaian masyarakat/LPM.

Sedang materi-materi yang terkait dengan pendidikan civic bagi masyarakat mencoba menggali hal-hal yang sekiranya menjadi problem yang selama ini dihadapi oleh komunitas (masyarakat Indonesia) yang sedang membangun kekuatan masyarakat sipil untuk menuju bangunan masyarakat madani kuat. Problem-problem tersebut dikemas dalam isi pembahasan meliputi: *Pertama*, Konsep dan Karakteristik Pendidikan Kewargaan. *Kedua*, Pendekatan, Wahana, dan Teknik Pendidikan Kewargaan. *Ketiga*, Harmoni Sosial Keagamaan. *Ke-empat*, Pelayanan Kesehatan. *Kelima*, Pelayanan Pendidikan. *Keenam*, Sosial Ekonomi. *Ketujuh*, Masalah Politik, *Kedelapan*, Konstitusi dan Hukum kemudian diakhiri dengan Isu Lingkungan Hidup.

Dengan menggunakan buku panduan ini para penulis berharap bahwa materi-materi yang ada akan dapat mengantarkan masyarakat secara langsung terbentuk perilaku/karakter masyarakat civil yang *civilized* untuk menuju bangunan masyarakat madani yang kuat.

Bagian Kedua

**PANDUAN PENDIDIKAN
KEWARGAAN**

KONSEP DAN KARAKTERISTIK PENDIDIKAN KEWARGAAN

KONSEP PENDIDIKAN KEWARGAAN BERBASIS MASYARAKAT

Masalah pendidikan kewargaan berbasis masyarakat di Indonesia muncul berkaitan dengan reformasi pendidikan yang menghendaki adanya pergeseran paradigma pendidikan dari sentralistik ke desentralistik, bergeser dari praktik pendidikan yang otoriter ke praktik pendidikan demokratis yang membebaskan, serta dari konsep pendidikan yang berorientasi pemerintah (*state oriented*) ke konsep pendidikan yang berorientasi masyarakat (*community oriented*).

Demokrasi pendidikan, dapat diwujudkan di antaranya melalui penerapan konsep pendidikan kewargaan berbasis masyarakat dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan nasional. Apabila demokrasi mulai diterapkan dalam pendidikan, maka pendidikan tidak akan menjadi alat penguasa. Rakyat atau masyarakat diberikan haknya secara penuh untuk ikut menentukan kebijakan pendidikan nasional. Semua pihak yang berkepentingan dengan

pendidikan diharapkan dapat berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pendidikan.¹

Konsep pendidikan kewargaan ini menghendaki adanya keterlibatan masyarakat dalam upaya pengambilan kebijakan-kebijakan pendidikan. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pendidikan di Indonesia bukanlah hal yang baru, ia telah dilaksanakan oleh yayasan-yayasan swasta, kelompok sukarelawan, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan bahkan oleh perseorangan.² Di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, partisipasi masyarakat dalam rangka pendidikan kewargaan berbasis masyarakat telah dilaksanakan lebih lama lagi, yaitu setua sejarah perkembangan Islam di bumi Nusantara. Hampir seluruh lembaga pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari *rangkang*, *dayah*, *meunasah* (Aceh), *surau* (Minangkabau), *pesantren* (Jawa), *bustanul atfal*, *diniyah* dan sekolah-sekolah Islam lainnya didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat Muslim.³ Lembaga-lembaga ini hanya sekedar contoh bagaimana konsep pendidikan berbasis masyarakat diterapkan oleh masyarakat Indonesia dalam lintasan sejarah.

Pendidikan kewargaan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang dirancang, dilaksanakan, dinilai dan dikembangkan oleh masyarakat yang mengarah pada usaha menjawab tantangan dan peluang yang ada di lingkungan masyarakat tertentu dengan berorientasi pada masa depan.⁴

¹ Kartini Kartono, *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik dan Sugesti*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), 196-197

² Suyata, *Community Participation in School Development: Acces, Demand, and School Construction*, (Jakarta: Directorate General of Primary and Secondary Education, Ministry of Education and Culture 1996), 2

³ Azyumardi Azra, makalah "Masalah dan Kebijakan Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah" disampaikan pada *Konferensi Nasional Manajemen Pendidikan* di Hotel Indonesia (Jakarta: 8-10 Agustus 2002), 5-6

⁴ Umberto Sihombing, "Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat" dalam Jalal dan Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001),186

Dengan kata lain, pendidikan kewargaan berbasis masyarakat adalah konsep pendidikan “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”

Konsep pendidikan kewargaan berbasis masyarakat memiliki paradigma antara lain adanya struktur organisasi keilmuan yang jelas yakni berbasis pada ilmu politik, hukum dan filsafat moral /filsafat Pancasila dan memiliki visi yang kuat *nation and character building, citizen empowerment* (pemberdayaan warga negara), yang mampu mengembangkan *civil society* (masyarakat kewargaan). Konsep pendidikan kewargaan secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1: Konsep Pendidikan Kewargaan Berbasis Masyarakat

Dimensi	Paradigma
Visi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penekanan pada <i>nation and character building</i>. 2. Pemberdayaan warga negara (<i>citizen empowerment</i>). 3. Penguatan berkembangnya masyarakat kewargaan (<i>civil society</i>).
Misi	<p>Good Citizen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Berbudaya politik kewargaan (<i>civic culture</i>). 3. Berkemampuan berpikir kritis dan kreatif.
Substansi Materi	Demokrasi politik, demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial yang dikembangkan terutama dari disiplin ilmu politik, hukum dan filsafat moral/filsafat Pancasila.
Sifat	<i>Incidental, ad hoc</i> , “tidak terencana”, tidak menggunakan disiplin ilmu pembelajaran tertentu
Nilai-nilai fundamental	<ol style="list-style-type: none"> 1. kesetaraan gender, 2. <i>pro green</i> (peduli lingkungan), 3. <i>respect</i> (menghormati), 4. <i>responsibility</i> (tanggung jawab), 5. <i>resilience</i> (ulet), 6. <i>integrity</i> (tangguh), 7. <i>care</i> (peduli), 8. <i>harmony</i> (rukun).
Performance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuat/jelas akar keilmuannya (<i>body of knowledge</i>).

Dimensi	Paradigma
	2. Terbebas (independen) dari intervensi rezim 3. Memiliki otonomi keilmuan dan eksistensi yang kuat sehingga mampu mempertahankan jati dirinya sebagai pendidikan kewargaan terhadap perubahan rezim. 4. Fokus sebagai pendidikan kewargaan (pendidikan demokrasi, pendidikan hukum dan pendidikan moral) tampak jelas dan kuat. Kredibilitas akademik dan fungsinya akan menguat karena disamping akar keilmuannya yang jelas, juga akan dirasakan sebagai sesuatu yang fungsional bagai masyarakat yang sedang mengembangkan demokrasi dan demokratisasi.

KARAKTERISTIK PENDIDIKAN KEWARGAAN

Terdapat 3 macam karakteristik pendidikan kewargaan di Indonesia, yakni: Konservatif, Reformatif, dan Transformatif. Perbandingan ketiga karakteristik tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2: Perbandingan 3 Karakteristik Pendidikan Kewargaan⁵

Karakteristik	Konservatif	Reformatif	Transformatif
Fungsi	Menyesuaikan	Memperbarui	Mengubah
Tujuan	Menolak perubahan, dan menjaga kestabilan tatanan sosial yang sudah mapan	Merubah orang-orang agar menyesuaikan diri dengan tatanan sosial yang sudah ada	Memperbaharui masyarakat agar dapat terjadi perubahan secara adil dan manusiawi
Strategi	Mengajak masyarakat untuk menerima dan menyesuaikan diri terhadap tatanan sosial yang sudah mapan tanpa harus merubah	Melakukan berbagai perubahan tertentu tanpa berusaha merubah aspek-	Secara aktif menentang ketidakadilan sosial dan korupsi. Bekerja untuk terjadinya proses perubahan yang mendasar dan

⁵ Agung Wijaya, *Konsep, Pola, dan Metode Pendidikan Kewarganegaraan* (Makasar: Ppt. 7 Mei 2012)

Karakteristik	Konservatif	Reformatif	Transformatif
	aspek-aspek yang mengakibatkan ketidakadilan	aspek ketidakadilan yang ada di dalamnya	menyeluruh
Perlakuan terhadap masyarakat	Pengendalian secara ketat (anti perubahan)	Pengendalian secara ketat (anti perubahan)	Membebaskan dari ketidakadilan (perubahan sosial)
Pola Pendekatan	Kekuasaan	Pengendalian dari atas ke bawah dengan kedok kebaikan hati	Kemanusiaan dan Demokrasi (pengendalian dilakukan bersama)
Perasaan anak didik kepada pengajar	Takut, guru adalah orang yang paling benar, paling tahu segala hal yang sama sekali di luar jangkauan pikiran anak didik.	Segan, guru adalah sahabat, dengan kekuasaan dan sifat kebapakan yang tahu apa yang terbaik bagi anak didiknya.	Percaya, guru adalah fasilitator yang membantu setiap orang dalam rangka mencari jawaban secara bersama.
Metode Pengajaran	<ul style="list-style-type: none"> o Guru memberi kuliah o Murid bertanya terbatas o Membosankan 	<ul style="list-style-type: none"> o Guru menyampaikan pelajaran dengan mencoba menarik perhatian murid; o Ada dialog dan diskusi kelompok, namun jawaban akhir yang dianggap benar tetap dari sang 	<ul style="list-style-type: none"> o Dialog terbuka dan bebas di mana setiap orang dihargai pendapatnya; o Jawaban masalah atas dasar pengalaman setiap orang; o Setiap orang saling mendidik satu sama lain

Karakteristik	Konservatif	Reformatif	Transformatif
		Guru	
Cara anak didik belajar	Pasif; Murid-murid menerima apa saja yang disajikan oleh guru dan menghafalkan mentah-mentah	Murid-murid lebih aktif, namun masih tetap didasarkan pada hafalan	Aktif; Setiap orang Memberikan sumbangsihnya terhadap proses belajar melalui tindakan nyata dan diskusi bersama.
Evaluasi	Terutama untuk "menyingkirkan" murid-murid yang lamban dan tidak mampu dalam rangka kenaikan tingkat/kelas	Bermacam-macam, tapi umumnya dalam rangka menguji siapa yang bisa lulus dan siapa yang tidak.	<ul style="list-style-type: none"> o Terutama untuk melihat apakah suatu gagasan telah diungkapkan dan difahami dengan jelas, dan apakah metode belajar yang digunakan memang sudah berjalan baik. Tidak ada tingkatan, kelak siapa yang belajar lebih cepat akan membantu rekannya yang lamban. o Sederhana & berkesinambungan disusun oleh masy, warga belajar sendiri bersama fasilitator, mereka semua saling mengevaluasi satu sama lain (sebagai umpan-balik)

Ditinjau dari tiga macam karakteristik tersebut, maka karakter kewargaaan (*civic dispositions*) yang dibangun melalui pendidikan kewargaan berbasis masyarakat ini adalah perubahan dari konservatif ke reformatif menuju transformatif. Adapun karakteristik masyarakat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Menjadi anggota masyarakat yang independen (mandiri).
Karakter ini merupakan kepatuhan secara suka rela terhadap peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab atas segala konsekuensi yang timbul dari perbuatannya serta menerima kewajiban moral dan legal dalam masyarakat demokratis.
2. Memenuhi tanggung jawab personal kewargaan di bidang ekonomi dan politik. Yang termasuk karakter ini, antara lain: mengurus diri sendiri, memberi nafkah /menopang keluarga, merawat, mengurus dan mendidik anak, mengikuti informasi tentang isu-isu publik, memberikan suara (*voting*), membayar pajak, menjadi saksi di pengadilan, meberikan pelayanan kepada masyarakat, melakukan tugas kepemimpinan sesuai dengan bakat dan kemampuan sendiri/masing-masing.
3. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan setiap individu.
Yang termasuk karakter ini, antara lain: mendengarkan pendapat orang lain, berperilaku santun (bersikap sopan), menghargai hak dan kepentingan sesama warganegara, mematuhi prinsip aturan mayoritas, namun tetap menghargai hak minoritas untuk berbeda pendapat.
4. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewargaan secara bijaksana dan efektif.
Karakter ini menghendaki pemilikan informasi yang luas sebelum memberikan suara (*voting*) atau berpartisipasi dalam debat publik, keterlibatan dalam diskusi yang santun dan serius, dan memegang kendali kepemimpinan yang sesuai. Juga menghendaki kemampuan membuat evaluasi kapan saatnya kepentingan pribadi sebagai warga negara dikesampingkan demi kepentingan umum dan kapan seseorang karena kewajibannya atau prinsip-prinsip konstitusional untuk menolak tuntutan-tuntutan kewargaan tertentu. Sifat-sifat warganegara yang dapat menunjang karakter berpartisipasi dalam urusan-urusan kewargaan (publik) diantaranya:

- a) Keberadaban (*civility*), yang termasuk sifat ini: menghormati orang lain, menghormati pendapat orang lain meskipun tidak sepaham, mendengarkan pandangan orang lain, menghindari argumentasi yang bermusuhan, sewenang-wenang, emosional dan tidak masuk akal.
- b) Menghormati hak-hak orang lain, yang termasuk sifat ini: menghormati hak orang lain bahwa mereka memiliki suara yang sama dalam pemerintahan dan sama di mata hukum, menghormati hak orang lain untuk memegang dan menganjurkan gagasan yang bermacam dan bekerjasama dalam suatu asosiasi untuk memajukan pandangan-pandangan mereka.
- c) Menghormati hukum, yang termasuk sifat ini: berkemauan mematuhi hukum, bahkan ketika ia tidak menyepakatinya, berkemauan melakukan tindakan dengan cara-cara damai dan legal untuk mengubah hukum yang tidak arif dan adil.
- d) Jujur: berkemauan untuk memelihara dan mengekspresikan kebenaran.
- e) Berpikiran terbuka: yaitu mempertimbangkan pandangan orang lain.
- f) Berpikir kritis: yaitu kehendak hati untuk mempertanyakan keabsahan/kebenaran berbagai macam posisi termasuk posisi dirinya.
- g) Bersedia melakukan negosiasi dan berkompromi: yaitu kesediaan untuk membuat kesepakatan dengan orang lain meskipun terdapat perbedaan yang sangat tajam/mendalam, sejauh hal itu dinilai rasional dan adanya pembenaran secara moral untuk melakukannya.
- h) Ulet/tidak mudah putus asa: yaitu kemauan untuk mencoba berulang-ulang untuk meraih suatu tujuan.
- i) Berpikiran kewargaan: yaitu memiliki perhatian dan kepedulian terhadap urusan-urusan publik/kemasyarakatan.

- j) Empati/memiliki perasaan kasihan: yaitu mempunyai kepedulian agar orang lain hidupnya lebih baik, khususnya terhadap mereka yang kurang beruntung.
 - k) Patriotisme: memiliki loyalitas terhadap nilai-nilai demokrasi konstitusional.
 - l) Keteguhan hati: kuat untuk tetap pada pendiriannya, ketika kata hati menuntutnya.
 - m) Toleran terhadap ketidak-pastian: yaitu kemampuan untuk menerima ketidak pastian yang muncul, karena ketidak-cukupan pengetahuan atau pemahaman tentang isu-isu yang kompleks atau tentang ketegangan antara nilai-nilai fundamental dengan prinsip-prinsip.
5. Mengembangkan fungsi demokrasi konstitusional yang sehat. Karakter ini mengarahkan warganegara agar bekerja dengan cara-cara damai dan legal dalam rangka mengubah undang-undang yang dianggap tidak adil dan bijaksana. Yang termasuk dalam karakter ini: sadar informasi dan kepekaan terhadap urusan-urusan publik, melakukan penelaahan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional, memonitor keputusan para pemimpin politik dan lembaga-lembaga publik dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusional dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat kekurangannya.

PENDEKATAN, WAHANA, DAN TEKNIK PENDIDIKAN KEWARGAAN

PENDEKATAN PENDIDIKAN KEWARGAAN

Pendidikan berbasis masyarakat sesungguhnya bukan hanya dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan luar sekolah (nonformal), UU No. 20 Tahun 2003 pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Oleh karena itu, pendidikan berbasis masyarakat dapat juga mengambil jalur formal, nonformal dan informal.

Pendidikan berbasis masyarakat dengan proses formal biasanya merupakan pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi birokrasi formal semisal sekolah atau universitas berdasarkan kurikulum yang telah ditentukan. Pendidikan berbasis masyarakat dengan proses nonformal dapat mengambil bentuk pendidikan di luar kerangka sistem formal yang menyediakan jenis pelajaran terpilih, seperti di perpustakaan, museum, atau internet. Mekanisme non formal memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup. Adapun pendidikan berbasis masyarakat dengan proses informal merupakan pendidikan yang diperoleh individu melalui interaksinya dengan orang lain di

tempat kerja, dengan keluarga, dengan teman, atau berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial.

Buku ini akan lebih difokuskan pada pendekatan pendidikan kewargaan yang bersifat informal, yakni dengan mengajak masyarakat berinteraksi dan terlibat secara langsung untuk melakukan tindakan nyata dalam rangka mengubah pranata sosial yang lebih baik demi masa depan anak cucu mereka dan bangsa Indonesia. Agar mereka sadar dan mau bangkit untuk melakukan sesuatu perubahan, diperlukan berbagai variasi pendekatan pendidikan kewargaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, pendekatan budaya. Pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan yang terjadi dan berlangsung di lingkungan keluarga dimana (melalui berbagai perintah, tindakan dan perkataan) ayah dan ibunya bertindak sebagai pendidik. Dengan demikian pendidikan luar sekolah pada permulaan kehadirannya sangat dipengaruhi oleh pendidikan atau kegiatan yang berlangsung dalam keluarga. Di dalam keluarga terjadi interaksi antara orang tua dengan anak, atau antar anak dengan anak. Pola-pola transmisi pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai dan kebiasaan melalui asuhan, suruhan, larangan dan pembimbingan. Pada dasarnya semua bentuk kegiatan yang berlangsung di lingkungan keluarga dilakukan untuk melestarikan dan mewariskan kebudayaan secara turun temurun. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan praktis di masyarakat dan untuk meneruskan warisan budaya yang meliputi kemampuan, cara kerja dan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Jadi dalam keluarga pun sebenarnya telah terjadi proses-proses pendidikan. Kegiatan belajar-membelajarkannya yang asli inilah yang termasuk ke dalam kategori pendidikan tradisional yang kemudian menjadi pendidikan luar sekolah.

Kedua, pendekatan struktural prosedural, melalui proses politik (demokrasi) dalam konteks sosio-historis yang menyentuh hubungan negara dan masyarakat. Adanya undang-undang,

peraturan-peraturan, maupun keputusan-keputusan dari pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, seperti masuknya demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial (termasuk dalam hukum). Melalui sosialisasi peraturan dan perundang-undangan dan pendampingan dari pemerintah pusat hingga RT/RW masyarakat juga dilatih pengembangan keterampilan-keterampilan pembuatan keputusan. Para fasilitator menggunakan studi-studi kasus tentang isu politik dan hukum untuk menolong masyarakat agar berkembang keterampilannya dalam membuat keputusan. Masyarakat diajari mengenali isu, menguji alternatif-alternatif pilihan, dan konsekuensi dari masing-masing pilihan, serta mempertahankan satu pilihan yang mereka anggap lebih baik ketimbang pilihan lain.

Ketiga, pendekatan partisipatoris. Para fasilitator menekankan kebijakan-kebijakan kewargaan melalui kegiatan-kegiatan kooperatif dalam kelompok-kelompok kecil yang mendorong masyarakat untuk bekerja bersama-sama. Melalui kegiatan belajar secara kooperatif masyarakat mengembangkan berbagai keterampilan partisipatoris dan kebijakan-kebijakan kewargaan yang terkait. Masyarakat yang terlibat dalam pembelajaran kooperatif cenderung berkembang keterampilan-keterampilannya seperti kepemimpinan, negosiasi, kompromi, penyelesaian konflik, dan kritik yang membangun. Kebijakan mereka seperti toleransi, keberadaban dan kejujuran juga berkembang.

Keempat, pendekatan kearifan lokal. Para fasilitator pendidikan kewargaan menggali dan memberdayakan potensi sumberdaya manusia, potensi agama, potensi budaya, dan potensi sumberdaya alam pada masing-masing daerah yang berbeda-beda. Masing-masing daerah mempunyai SDM yang dapat dijadikan asset dan kekuatan dalam pendidikan kewargaan.

Agama dapat menjadi sumber kearifan lokal dan membangun karakter bangsa yang kokoh apabila agama didakwahkan dengan menggunakan pendekatan hikmah penuh

kelembutan, keakraban, dan kesopanan. Aneka budaya lokal di Indonesia seperti seni, bahasa, produk-produk keterampilan, kuliner, pakaian, sistem sosial seperti kerajaan dan adat merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya yang harus dirawat dan dikembangkan.

Potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah, keluasan dan kesuburan tanahnya, kekayaan laut yang seakan tak terbatas, aneka macam satwa dan tanaman hayati, keadaan alam yang berupa pantai, gunung, goa, hutan, iklim dan cuacanya yang sangat indah. Pendek kata terdapat banyak keunikan bangsa ini dengan potensi alam yang dimilikinya yang harus digali, dilestarikan, dan dikembangkan sebagai produk-produk unggulan berskala internasional. Melalui pendidikan berbasis potensi lingkungan diharapkan tumbuh kearifan lokal dan karakter peduli lingkungan yang dapat memanfaatkan lingkungan untuk kepentingan hidupnya.

WAHANA PENDIDIKAN KEWARGAAN

1. Majelis Ta'lim

Menurut akar katanya, istilah Majelis Ta'lim berasal dari bahasa Arab yang tersusun dari gabungan dua kata; *majlis* (tempat) dan *ta'lim* (pengajaran); berarti tempat pengajaran atau pengajian bagi orang-orang yang ingin mendalami ajaran-ajaran Islam.

Sebagai sebuah sarana da'wah dan pengajaran agama Islam, Majelis Ta'lim sesungguhnya memiliki basis tradisi yang kuat, yaitu sejak Nabi Muhammad SAW mensyiarkan agama Islam di awal-awal risalah beliau. Dalam komunitas masyarakat muslim Majelis Ta'lim menjadi sarana untuk saling bertemu dan belajar agama Islam bersama, yang biasanya dilaksanakan secara rutin seminggu sekali, dua minggu sekali, atau sebulan sekali. Majelis Ta'lim ini dapat dijadikan wahana untuk pendidikan kewargaan yang dikorelasikan dengan nilai-nilai Islam.

2. Rumah Aspirasi

Rumah aspirasi adalah sebuah wadah yang dibangun oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk berkomunikasi dengan konstituennya di daerah pilihan masing-masing sebagai media untuk mendekatkan anggota dewan dengan konstituennya dalam fungsi legislasi dan pengawasan. Dengan adanya rumah aspirasi, anggota dewan dapat lebih intens menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Rumah aspirasi juga menjadi alat pantau dari dan oleh rakyat bersama anggota dewan. Rumah aspirasi juga berpeluang menjadi arena pendidikan politik dan pencerdasan warga. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia, serta sumber daya manusia yang terpilih (ditentukan oleh Anggota Dewan), maka rakyat akan terangsang untuk berpikir, bersosialisasi, dan belajar aktivitas politik.

3. Rumah Pintar

Rumah Pintar adalah “Rumah Pendidikan” yang dibangun oleh masyarakat dengan tujuan: (1) meningkatkan minat baca, mengembangkan potensi kecerdasan anak, dan pengenalan teknologi, (2) mengembangkan dan memberdayakan keterampilan masyarakat berbasis potensi lokal, (3) memacu kreativitas masyarakat guna mempertahankan dan melestarikan budaya lokal, (4) menumbuhkembangkan kemampuan berwirausaha berbasis potensi lokal, dan (5) meningkatkan taraf hidup keluarga.

Dengan adanya Rumah Pintar ini, pendidikan tidak berakhir pada saat berakhirnya pendidikan sekolah atau formal saja, akan tetapi merupakan proses pendidikan sepanjang hayat yang mencakup keseluruhan kurun waktu hidup seorang, yang mengarah pada upaya untuk menumbuhkan *masyarakat gemar belajar (learning society)*.

4. Cangkrukan

Cangkrukan adalah istilah dari bahasa Jawa “cangkruk”, yang berarti kongkow-kongkow atau ngobrol. Cangkrukan adalah salah satu tradisi dari kebudayaan orang Jawa bersama kawan, teman, saudara atau para tetangga di desa di depan rumah atau di tepi jalan kampung atau di pos-pos kamling yang nyaman buat ngobrol, cerita pengalaman hingga curhat dan ada suguhan berupa makanan dan minuman.

Aktivitas cangkrukan di kampung/pedesaan umumnya dilakukan secara alamiah tanpa ada janji dulu dengan tetangga sebagai partner cangkruk. Para warga biasanya meluangkan waktu untuk cangkrukan pada saat istirahat sore menjelang magrib atau malam setelah *'isyak* (setelah pukul 20.00 wib) terutama untuk bapak-bapak, bahkan kadang-kadang sampai larut malam.

Warga kampung di desa-desa sangat menikmati budaya cangkrukan ini pada saat bulan purnama. Manfaat dari cangkrukan antara lain: dapat bertukar pengalaman antar sesama, pengalaman kerja maupun pengalaman dalam berumah tangga, dan saling mengenal lebih akrab antara satu sama lain. Budaya cangkrukan dapat pula menjadi salah satu wahana untuk pendidikan kewargaan.

5. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan perempuan Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Aktifitas PKK adalah menjalankan 10 program pokok; (1) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, (2) Gotong Royong, (3) Pangan, (4) Sandang, (5) Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga, (6) Pendidikan dan Keterampilan, (7) Kesehatan, (8) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, (9) Kelestarian Lingkungan Hidup, (10) Perencanaan Sehat.

Kesepuluh program pokok PKK tersebut sejalan dengan visi-misi pendidikan kewargaan. Para ibu-ibu di sebuah RT/RW

mengadakan pertemuan rutin PKK biasanya sebulan sekali di balai RT/RW. Dengan demikian pertemuan PKK ini sangat efektif jika dijadikan wahana pendidikan kewargaan, terutama dalam pemberdayaan perempuan dan gender.



6. Dasawisma

Dasawisma merupakan unit terkecil dari kelompok PKK (ibu-ibu) yang terdiri dari 10 sampai 20 Kepala Keluarga (KK) dalam satu wilayah Rukun Tetangga (RT). Dari 10-20 KK itu, ada seorang penanggung jawab untuk memantau kondisi rumah tangga yang lain. Prinsip dasawisma adalah pengawasan dan pemberdayaan hingga ke masyarakat bawah dan menyentuh unit masyarakat terkecil, yakni keluarga.

Fungsi kelompok Dasawisma ini adalah sebagai penggerak dan pembina masyarakat di lingkungannya untuk turut mensukseskan pelaksanaan program pokok PKK. Kelompok dasawisma tersebut termasuk kelompok informal karena selain mensukseskan program pokok PKK juga mempunyai kegiatan lain diantaranya *sharing* (tukar pendapat), pengajian dan kegiatan ibu-ibu lainnya. Dari beberapa kegiatan ini dapat mempererat tali silaturahmi dan rasa solidaritas diantara mereka.

Kelompok sosial ini juga disebut kelompok sosial sekunder karena anggotanya juga bermacam-macam mulai dari golongan atas sampai golongan menengah kebawah, dan mereka saling membaur tanpa memandang status sosial maupun ekonomi, sehingga melalui dasawisma ini dapat dijadikan wahana pendidikan kewargaan yang efektif.

7. Musrenbang

Kata musrenbang merupakan singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Kata musyawarah berasal dari Bahasa Arab yang menggambarkan bagaimana warga saling berdiskusi memecahkan masalah konflik dan juga problem di masyarakat. Oleh karena itu, Musrenbang identik dengan diksusi di masyarakat/kelurahan tentang kebutuhan pembangunan daerah.

Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran yang berjalan sesuai dengan tingkatannya. Tujuan diadakannya Musrenbang yaitu untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan yang sesuai dengan tingkatan dibawahnya serta menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber pendanaan lainnya.

Dengan demikian, Musrenbang merupakan wahana pendidikan kewargaan, karena para tokoh masyarakat saling berpartisipasi untuk menentukan masa depan rakyatnya.

8. Perlombaan

Menjelang datangnya peringatan hari-hari besar yang bersejarah di Indonesia seperti hari kemerdekaan RI, hari ulang tahun berdirinya suatu organisasi/kelembagaan besar, hari ulang tahun para tokoh-tokoh besar, pada umumnya masyarakat mengadakan berbagai jenis perlombaan.

Diantara tujuan perlombaan: (1) mempererat tali silaturahmi antar sesama warga, (2) meningkatkan semangat juang dalam meraih prestasi, (3) memupuk jiwa sportifitas dalam berlomba, (4) memupuk semangat kebangsaan antar generasi untuk memperkuat ketahanan nasional menghadapi tantangan global, (5) mencari para generasi terbaik untuk menjadi teladan bagi sesama.

Melalui perlombaan-perlombaan tersebut dapat dijadikan wahana pendidikan kewargaan, terutama mendidik agar masyarakat bersikap sportif, yakni para generasi berupaya semaksimal mungkin menjadi yang terbaik, yang menang tidak menjadi sombong dan yang kalah tidak menjadi dendam, akan tetapi memahami kekurangannya dan berusaha memperbaikinya.

9. Kuliah Kerja Nyata

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah satu wujud dari tri dharma perguruan tinggi. Dengan bimbingan para dosen mahasiswa diarahkan, dilatih dan didampingi agar mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan masyarakat yang berorientasi pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama di daerah-daerah tertinggal.

Program KKN sebagai wahana pendidikan kewargaan terutama bagi para generasi muda (mahasiswa) agar menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi umat.

10. Community Based Research (CBR)

CBR merupakan penelitian sosial yang menekankan pada keterlibatan (*engagement*), *interdependensi* (saling ketergantungan) antara peneliti dan komunitas untuk memperoleh perubahan sosial. CBR merupakan penelitian yang dikonsumsi dan ditindaklanjuti, bukan sebuah hasil laporan yang hanya disimpan dalam perpustakaan atau di tulis dalam jurnal, namun CBR merupakan penelitian yang bermitra antara peneliti dengan masyarakat untuk bersama-sama melakukan perubahan tatanan kehidupan yang lebih baik.

Penelitian ini dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian atau pengabdian masyarakat baik di lingkungan pemerintah maupun swasta/LSM melalui penelitian kolektif.

Di perguruan tinggi/universitas, CBR dapat dilaksanakan oleh tim dosen atau dosen dengan mahasiswa. Dengan adanya CBR, akan mendekatkan antara perguruan tinggi dengan masyarakat yang sekaligus dapat dijadikan wahana pendidikan kewargaan.

TEKNIK PENDIDIKAN KEWARGAAN

Teknik pendidikan kewargaan dapat dilaksanakan dengan pendekatan kekuasaan dan pendekatan demokratis. Beberapa teknik pendekatan kekuasaan misalnya dengan sosialisasi, penataran, pendampingan, iklan layanan masyarakat, kampanye pemilu, dll.

1. **Sosialisasi;** yaitu semua langkah-langkah yang bertujuan untuk memasyarakatkan paradigma nasional. Adanya peraturan-peraturan pemerintah serta hukum-hukum baru yang berlaku bagi setiap warga Indonesia untuk ditaati dalam kehidupan sehari-hari, pasti ditindaklanjuti dengan mengenalkan/menginformasikan kepada seluruh masyarakat melalui sosialisasi.
2. **Penataran/pelatihan/workshop;** merupakan kegiatan lanjutan dari sosialisasi. Beberapa peraturan yang urgen dan harus segera dilakukan oleh warga agar permasalahan sosial dapat segera teratasi misalnya tentang kesetaraan gender, kekerasan dalam rumah tangga, pelestarian lingkungan, dan lain-lain, perlu diadakan pelatihan-pelatihan secara terus-menerus hingga terjadi perubahan sosial yang signifikan.
3. **Pendampingan;** merupakan kegiatan pendidikan kewargaan secara langsung. Para pemangku kebijakan dan orang-orang terlatih secara langsung turun ke masyarakat untuk memberi layanan pendampingan. Kelompok-kelompok masyarakat, setelah diberi pelatihan kemudian diminta untuk mengaplikasikan dalam riil kehidupannya, misalnya untuk mengatasi pencemaran lingkungan, peningkatan layanan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, dll.

Disamping memberi pelatihan, para pendamping juga melakukan monitoring dan evaluasi terus-menerus hingga selesai pendampingan sesuai dengan tarjet waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya pendampingan ini diharapkan masyarakat dapat mengembangkannya secara berkelanjutan dalam kehidupan mereka.

4. **Iklan layanan masyarakat;** melalui media yang dimiliki masyarakat baik cetak elektronik, maupun pertunjukan-pertunjukan budaya, pendidikan kewargaan harus terus-menerus dilakukan oleh pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat.
5. **Kampanye pemilihan umum;** merupakan ajang berlangsungnya proses komunikasi politik yang pada dasarnya ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan umum (public interest) dengan memilih para pemimpin sebagai wakil rakyat yang mampu memberikan yang terbaik bagi rakyat dan masa depan bangsa. Kampanye seharusnya dilaksanakan dengan jujur, adil dan sportif, namun kenyataannya di Indonesia masih banyak yang menggunakan cara-cara yang sebaliknya sehingga disebut sebagai kampanye hitam (black campaign). Melalui teknik kampanye pemilu yang jujur, adil, dan sportif harus diupayakan secara intensif oleh pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian dan kedewasaan rakyat menuju masyarakat madani.

Adapun yang termasuk teknik pendekatan demokratis misalnya dengan bercerita/dongeng, contoh praktis/pembiasaan, dialog warga/diskusi komunitas, tatap muka, ceramah, persuasif, dan lain-lain.

1. **Bercerita/dongeng;** dapat dilakukan dalam keluarga, para orang tua secara rutin setelah makan malam atau pada waktu liburan dapat bercengkerama dengan anak-anak atau anggota keluarga. Untuk menanamkan nilai-nilai luhur untuk menjadi warga negara yang baik para orang tua dapat bercerita tentang suatu peristiwa atau mendongeng tentang kisah para tokoh. Peristiwa atau kisah yang disampaikan dengan berceritera atau

mendongeng dapat menginspirasi/memotivasi mereka untuk melakukan sesuatu yang baik, disamping menambah keakraban dan kehangatan keluarga.

2. **Contoh praktis/pembiasaan;** merupakan teknik pendidikan kewargaan yang sangat sederhana dan efektif, terutama bagi anak-anak. Perilaku-perilaku yang sering dilihat secara otomatis akan ditiru oleh anak-anak. Maka sebenarnya pendidikan kewargaan dimulai dari keteladanan para orang tua dalam keluarga masing-masing. Hanya dengan berperilaku baik, secara otomatis akan menyebabkan orang lain berbuat baik.
3. **Dialog warga/diskusi komunitas;** dapat digunakan terutama jika terjadi kasus yang menimpa warga, maka diskusi dari pihak-pihak yang terkait guna mencari solusi secara damai, penuh kebudayaan, saling memahami dan penuh rasa kekeluargaan, sangat diperlukan.
4. **Tatap muka;** yaitu pertemuan langsung secara berhadapan untuk saling memberi informasi atau menjelaskan sesuatu masalah berkaitan dengan peningkatan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara.
5. **Ceramah;** yaitu pertemuan dalam rangka menjelaskan sesuatu topik yang ingin didalami terutama yang erat kaitannya dengan peningkatan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara.
6. **Persuasif;** yaitu langkah-langkah yang mengutamakan pendekatan manusiawi dalam menggugah kesadaran warga negara agar secara tulus ikhlas melakukan yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara

Bagian Kedua

**PRAKTIK PENDIDIKAN
KEWARGAAN BERBASIS
MASYARAKAT**

LAYANAN DASAR PENDIDIKAN; DARI MASYARAKAT UNTUK MASYARAKAT

PENGANTAR



Gambar 1 : Anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan layanan pendidikan

Sering terlihat di jalan raya kota-kota besar anak-anak jalanan yang bekerja sebagai pengemis, pengamen, pengelap kaca mobil. Demikian juga di sudut-sudut kota masih sering kita lihat

anak-anak miskin terlantar. Di pedesaan masih banyak anak-anak yang bekerja sebagai pemulung, pencari kayu bakar, atau hanya bermain. Mereka belum mendapatkan layanan pendidikan dasar yang layak.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial DKI Jakarta, jumlah anak jalanan pada tahun 2009 sebanyak 3.724 orang, tahun 2010 meningkat menjadi 5.650 orang, dan pada tahun 2011 ini juga meningkat menjadi 7.315 orang. Pada umumnya mereka bekerja sebagai pengemis, pengamen, pengelap kaca mobil, pedagang asongan, joki *3 in 1*, dan parkir liar.

Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) tahun 2010 untuk anak jalanan baru menyentuh 5.119 anak. Atau 2,25 persen dari jumlah anak jalanan sebanyak 230.000 anak berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2009.

Menteri Sosial, Salim Segaf Al-Jufri, usai penandatanganan nota kesepahaman tujuh kementerian dan POLRI tentang penanganan Anak Jalanan Selasa (16/11), memaparkan program tersebut menggunakan APBN sebesar Rp 3,4 miliar dengan melibatkan 36 rumah singgah dan 83 satuan bhakti pekerja sosial. Ditambah dengan dana dekonsentrasi sebesar Rp 5,1 miliar yang melibatkan 52 rumah singgah dan 63 pekerja sosial.

TUJUAN

Semua anak Indonesia usia 4 – 12 tahun mendapatkan pendidikan yang layak

TARGET PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN

Setelah proses pembelajaran, masyarakat yang terlibat diharapkan dapat:

1. Membangun kesadaran bersama dan empati tentang hak pemenuhan pendidikan dasar;

2. Membangun kesadaran masyarakat atas hak kontrol yang mereka miliki untuk memastikan bahwa layanan pendidikan dasar di lingkungan mereka berjalan dengan baik;
3. Membangun kesadaran bersama bahwa masyarakat memiliki potensi yang besar untuk melakukan sesuatu di lingkungan mereka agar layanan pendidikan dasar dapat terwujud dengan optimal; dan
4. Memberikan alternatif model intervensi yang dapat dilakukan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki.

PESERTA

Pembelajaran ini dapat diikuti oleh masyarakat dari kalangan mana pun. Sebagai alternatif, misalnya dapat disampaikan dan diikuti oleh warga RT atau RW lintas usia dan jenis kelamin dan juga menyertakan stakeholders terkait.

PENDEKATAN DAN WAHANA

Layanan pemenuhan pendidikan dasar dapat dilaksanakan dengan pendekatan partisipatoris dengan wahana kegiatan-kegiatan rutin yang sudah ada di masyarakat seperti pengajian atau majlis taklim atau PKK di tingkat Desa/RT/RW atau Dasa Wisma.

TEKNIK PENYAMPAIAN

Teknik penyampaian melalui pendekatan partisipatoris dengan wahana PKK/Dasa Wisma/Majlis Ta'lim/Pengajian adalah:

1. Fasilitator mensurvey suatu wilayah/desa dan mengidentifikasi kondidi anak-anak terutama yang belum mendapat pendidikan layak
2. Mengolah hasil survey dan menyusun laporan untuk disampaikan ke masyarakat
3. Fasilitator bersilaturahmi ke tokoh masyarakat: Kepala Desa/Lurah, ketua Rukun Warga (RW), ketua Rukun Tetangga (RT), ketua Dasa Wisma, ketua Majlis Ta'lim/Peng-

- ajian untuk menyampaikan tujuan (fasilitasi layanan pendidikan dasar)
4. Mengikuti pertemuan/pengajian rutin yang ada di RW/RT, dan meminta waktu untuk menyampaikan data hasil *survey* dan menawarkan kepada peserta/jamaah untuk ikut berpartisipasi (menjadi fasilitator/volunter) dalam layanan pendidikan di lingkungannya
 5. Mengadakan pertemuan dengan para fasilitator/volunter untuk membentuk organisasi/kelompok layanan pendidikan dan menentukan program dan kegiatan
 6. Bersama Ormas baru melaksanakan layanan pendidikan dan pendampingan
 7. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan layanan pendidikan di lingkungan masing-masing.
 8. Merefleksi dan menentukan kegiatan tindak lanjut
 9. Secara mandiri masyarakat dapat melaksanakan layanan pendidikan dasar secara terus-menerus.

Teknik penyampaian dapat dijelaskan dalam skema berikut.



Gambar 2: Teknik Advokasi Layanan Pendidikan Dasar

MATERI: LAYANAN PENDIDIKAN DASAR Di INDONESIA

Aspek pendidikan sampai saat ini menjadi salah satu indikator penting bagi sebuah negara, khususnya Indonesia. Pendidikan yang baik, dengan pelaksanaan yang benar, dan

berkualitas tentunya akan memberikan dampak yang luar biasa besarnya bagi pembangunan nasional.

Pendidikan merupakan bahan baku yang mampu melahirkan generasi - generasi terdidik untuk mencapai pemberdayaan manusia yang optimal dan berkelanjutan. Tanpa pendidikan, tentu sebuah negara akan dikatakan kurang maju dan kurang berkembang. Oleh karena itu, perlunya membangun pendidikan menjadi sebuah urgensi yang hendaknya segera ditangani secara intensif dan berkelanjutan.



Gambar 3: Persentase Angka Melek Huruf Indonesia Tahun 2004 – 2013.

Sumber: diolah dari data BPS, 2014.

Data menyebutkan, dari tahun 2004 hingga tahun 2008 AMH Indonesia untuk usia penduduk 5 tahun ke atas terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk Indonesia yang lajunya mencapai sekitar 1,41% per tahun. Namun, terlihat mulai tahun 2009 hingga 2013, AMH Indonesia relatif berfluktuatif. Tahun 2009 dan tahun 2011 tampak turun dari sebelumnya. Memang penurunan AMH ini perlu dipahami dengan beberapa kemungkinan. Seseorang itu terhitung buta huruf apabila tidak bisa membaca atau tidak bisa menulis, apalagi kedua-duanya, baik latin maupun huruf lainnya. Sehingga penurunan AMH kemungkinan besar berkaitan dengan proporsi penduduk usia lanjut sedikit lebih besar, atau berkurangnya partisipasi sekolah

sehingga jumlah penduduk yang tidak mampu membaca dan atau menulis akan bertambah.

Kemungkin selanjutnya adalah adanya perbedaan cakupan wilayah dan metodologi pendataan penduduk buta huruf dan buta aksara yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga pembaca data, khususnya tahun 2011 perlu berhati-hati karena pada saat itu BPS melakukan perubahan metodologi pendataan penduduk terkait AMH dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Kondisi terakhir tahun 2013 berdasarkan data Statistik Indonesia menyebutkan, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak atau belum pernah sekolah sebanyak 7,80 persen. Persentase angka partisipasi sekolah di perkotaan masih 5,84 persen dan di perdesaan sebesar 9,79 persen. Lebih lanjut, jika dilihat berdasarkan golongan usia, di perkotaan persentase terkecil berada pada usia 10 - 14 tahun dan terbesar pada golongan usia 5 - 9 tahun. Artinya, di perkotaan, penduduk yang menyekolahkan ke PAUD hingga SD sudah bertambah banyak, sementara semangat penduduk untuk meneruskan sekolah dari SD ke SMP atau sederajat lebih kecil.

Sementara itu, di perdesaan, persentase angka partisipasi sekolah paling kecil pada golongan usia 15-19 tahun dan terbesar di golongan usia 5 - 9 tahun. Artinya, partisipasi penduduk untuk melanjutkan ke jenjang SMA paling kecil, mungkin karena kendala ekonomi dan lainnya, tetapi sama halnya di perkotaan, penduduk yang menyekolahkan anaknya ke PAUD hingga SD cukup besar.

Kualitas pendidikan di Indonesia memang masih sangat rendah bila di bandingkan dengan kualitas pendidikan di negara-negara lain. Hal-hal yang menjadi penyebab utamanya yaitu efektifitas, efisiensi, dan standardisasi pendidikan yang masih kurang dioptimalkan. Masalah-masalah lainnya yang menjadi penyebabnya yaitu: (1) rendahnya sarana fisik, (2) rendahnya kualitas guru, (3) rendahnya kesejahteraan guru, (4) rendahnya prestasi siswa, (5) rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan,

(6) rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan (7) mahal biaya pendidikan.

Adapun solusi yang dapat diberikan dari permasalahan di atas antara lain dengan menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan anak dan membangkitkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam melayani pemenuhan pendidikan dasar yang layak.

REFLEKSI

1. Fenomena seperti apa yang Anda dapatkan terkait pelaksanaan pemenuhan pendidikan dasar di lingkungan Anda?
2. Apakah manfaatnya bagi Anda dan keluarga dengan memahami dan membantu terlaksananya pendidikan dasar ini?
3. Rancanglah design program (untuk pertemuan awal), perbaikan program (untuk pertemuan selanjutnya) untuk meningkatkan layanan pendidikan dasar di lingkungan Anda. Pastikan Anda memanfaatkan sumber daya yang dimiliki!.

Menurut kamus Bahasa Indonesia Kata pendidikan berasal dari kata 'didik' dan mendapat imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

SEKOLAH INKLUSI, ALTERNATIF PEMBELAJARAN PARIPURNA

PENGANTAR

Dari empat anak Pak Sartono, salah satunya penyandang dissabilitas tuna daksa sejak lahir. Penghasilannya sebagai petani kecil tak memungkinkan Pak Sartono menyekolahkan Mira, anaknya yang malang itu ke SLB, sekalipun konon katanya gratis. Sebab SLB itu terletak di kota berbeda yang cukup jauh dari rumahnya. Jadilah Mira yang sebenarnya cukup cerdas itu hanya belajar calistung (membaca, menulis dan berhitung) ala kadarnya dari saudara-saudaranya yang lain. Ketika teman seusianya mulai masuk SMP, Mira semakin terkucil dan rendah diri karena hanya terkurung dalam kamarnya yang sederhana.

Tahukah Anda jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) penyandang dissabilitas di Indonesia cukup tinggi. Sekalipun keberadaan ABK dan persebarannya di tiap propinsi di Indonesia belum terdata secara pasti, paling tidak menurut WHO jumlah ABK di Indonesia sekitar 7% dari total jumlah anak usia 0-18 tahun atau sebesar 6.230.000 (WHO, 2007).

Sementara data BPS menyebut jumlah ABK usia sekolah sekitar 24,45% dari total penyandang dissabilitas di Indonesia atau sebesar 317.016. Dari jumlah itu yang telah bersekolah di SLB

(Sekolah Luar Biasa) baru 66.610 atau hanya 14,4%. Ini berarti ada 295.250 ABK yang belum jelas pemenuhan hak pendidikannya (BPS, 2004).

TUJUAN

1. Tujuan Pendidikan Inklusi

Menjamin kesetaraan dalam akses pendidikan, mengacu pada konsep *education for all* sebagaimana amanat UU Sisdiknas, termasuk di dalamnya untuk para penyandang disabilitas.

2. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Inklusi

Materi pendidikan inklusi diberikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk;

- a. Membangun kesadaran bersama dan empati tentang hak pemenuhan pendidikan dasar bagi semua, termasuk penyandang ABK, khususnya penyandang disabilitas;
- b. Membangun kesadaran bersama bahwa masyarakat memiliki potensi yang besar untuk melakukan sesuatu di lingkungan mereka agar penyandang disabilitas lebih diperhatikan; dan
- c. Memberikan alternatif model intervensi yang dapat dilakukan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki.

PESERTA

Pembelajaran ini akan diikuti oleh warga RT atau RW yang memiliki anak-anak usia sekolah penyandang disabilitas. Sasaran khusus pembelajaran hampir bagi semua warga, lintas usia dan jensi kelamin dan pada akhirnya akan mengerucut kepada stakeholders.

PENDEKATAN DAN WAHANA

Materi ini akan disampaikan dengan teknik partisipatori, mengedepankan keaktifan dan komunikasi di antara peserta. Fasilitator akan memfasilitasi agar pengalaman dan sumber daya peserta dan lingkungannya benar-benar dimunculkan dan menjadi bagian penting dalam merancang rencana tindak lanjut kegiatan.

Sementara wahana yang mungkin dilakukan adalah rembug warga, misalnya dalam forum pengajian RT untuk kaum ibu dan bapak, rapat RT untuk *stakeholders* di RT tersebut, dan Musrenbangdes.

MATERI-MATERI/POKOK BAHASAN

Guna mencapai target pembelajaran, peserta akan mendapatkan materi-materi berikut.

1. Apa dan bagaimana pendidikan inklusi.
2. Apa perbedaan dan keunggulan pendidikan inklusi dibandingkan SLB.
3. Kewajiban pemerintah dalam penyediaan layanan pendidikan bagi ABK.
4. Dukungan masyarakat dalam pengembangan pendidikan inklusi.
5. Design program dan monitoring evaluasi

TEKNIK PEMBELAJARAN

Teknik pembelajaran materi pendidikan inklusi dapat dijabarkan dalam langkah-langkah berikut.

1. Terdapat tim khusus yang dibentuk di awal yang akan menjadi penyampai atau semacam fasilitator yang akan menghubungi beberapa tokoh masyarakat (*key person*) untuk mendapatkan dukungan awal.

2. Proses membangun kesadaran awal dilakukan dengan memanfaatkan forum yang telah ada, yakni pengajian ibu-ibu RT/RW dan bapak-bapak di RT/RW.
3. Saat kegiatan rutin musyawarah RT/RW ide membantu akses pendidikan untuk ABK, khususnya penyandang disabilitas ini disampaikan. Dalam forum ini, dilakukan proses bedah dan analisis potensi dengan ABCD. Kemudian forum mendesign rancangan awal kegiatan yang akan dilaksanakan.
4. Tim pendataan yang dibentuk dalam musyawarah RT/RW mulai melakukan pendataan tentang jumlah dan keberadaan penyandang disabilitas (usia, jenis kelamin, kondisi keluarga, kemampuan kognisi dll.). Forum yang dimanfaatkan adalah Dasawisma yang ada di tiap 10 kepala keluarga.
5. Tim pimpinan yang terdiri dari para stakeholder kunci mendatangi pihak desa atau kelurahan dan kecamatan, termasuk UPT pendidikan setempat untuk mendapatkan dukungan dengan membawa data yang ada.
6. Dalam forum musyawarah RT/RW dimatangkan kembali rancangan lanjutan, disesuaikan dengan realitas dukungan yang dimiliki setelah disosialisasikan ke berbagai pihak. Dibentuk POKJA, akan lebih sempurna bila juga melibatkan ormas yang mengakar. Dalam Pokja dibentuk Tim Pendamping sesuai dengan usia atau jenis dan tingkat kecatatan, Tim Evaluator dan tim lain yang dibutuhkan.
7. Memasukkan isu akses pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam Musrenbangdes untuk mendapatkan dukungan yang luas dan berkelanjutan, termasuk dari pemerintah daerah.
8. Lewat bantuan Pemda/UPT Pendidikan, dilaksanakanlah pendidikan inklusi di SD/SMP terdekat dan juga ditunjuk SLB terdekat sebagai fasilitator.
9. Pimpinan Pokja (*key person*) mencoba menghubungi *corporate* di lingkungan mereka untuk mendapatkan dukungan pendanaan atau sarana prasarana.

10. Tim Evaluator akan mendapatkan laporan berkala dari Tim Pendamping terkait proses dan hasil pembelajaran penyandang disabilitas.
11. Merefleksi dan melakukan RTL.

MATERI: PENDIDIKAN INKLUSI

1. Amanat Khusus Bernama ABK

Tidak semua dari kita beruntung memiliki anak yang sempurna, tak bercacat. Bila kemudian Tuhan mengamanatkan anak penyandang *dissabilitas* kepada kita, sejatinya karena kita dipercaya memiliki kemampuan untuk tetap mengasuh dan mendidik mereka dengan baik. Tentu mengasuh dan mendidik ABK tidaklah mudah. Kemampuan dasar pertama yang harus dimiliki oleh keluarga inti, adalah kesabaran tanpa batas. Lebih-lebih bila mereka penyandang disabilitas mental.

Selain kesabaran, dibutuhkan pula ketrampilan teknis lain, sesuai dengan jenis disabilitas yang disandang. Bila penyandang tunanetra, pasti membutuhkan keluarga terdekat untuk mendampingi aktivitasnya, bila tunarungu dan wicara sebaiknya ada anggota keluarga yang memahami bahasa isyarat. Bila tuna daksa, maka soal desain ruang-ruang dalam rumah juga semestinya disesuaikan. Semua dukungan itu diperlukan, agar ABK kita dapat belajar mandiri, setidaknya dapat melayani kebutuhan dasarnya sendiri, semisal untuk makan, ke kamar mandi, dan aktivitas sederhana lainnya.

Mungkin kita juga pernah mendengar, orang tua yang merasa 'terpaksa' mengunci atau memasung anaknya yang penyandang disabilitas mental. Ada banyak alasan yang dikemukakan, umumnya karena dianggap mengganggu, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ada pula keluarga yang 'menyembunyikan' ABK-nya dengan alasan malu. Sikap semacam ini tentu hanya akan berujung pada ketergantungan sepenuhnya Sang ABK kepada keluarga. Sejatinya, mereka

sangat membutuhkan pemahaman dunia nyata, dunia yang sesungguhnya di luar rumahnya. Mereka sesekali membutuhkan tantangan dan kesulitan, agar lebih memiliki ketahanan hidup. Sebab, orang tua tempat mereka bersandar hari ini, belum tentu dapat terus menemani mereka nantinya.

2. ABK Rentan Menjadi Korban Tindak Kekerasan

Usia anak yang jumlahnya di Indonesia kurang lebih sepertiga jumlah penduduk adalah usia yang rentan mengalami perlakuan kekerasan dari lingkungan sekitarnya, sebab mereka belum cukup tangguh untuk membela diri. Lebih-lebih bila anak tersebut berkebutuhan khusus, mereka lebih rentan lagi sebagai korban kekerasan. Ibu Oki dari Advokasi Sadar Austisme Surabaya menuturkan, penyandang autisme berpotensi besar tidak hanya menjadi korban kekerasan tapi juga menjadi pelaku tindak kriminal yang diperintahkan kepada mereka.

Ada kisah, anak autis yang karena sangat ingin diterima di lingkungan sebayanya menuruti 'perintah' temannya untuk mengambil gambar saat ibunya sedang berganti pakaian. Oleh kawan sebaya yang usil dan tidak bertanggung jawab ini, foto semitelanjang sang ibu disebar lewat media sosial dan berujung pada dakwaan pornografi pada sang ibu tadi. Tentu sang anak yang autis tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Bahkan, di beberapa negara anak autis dimanfaatkan untuk menjadi pengantar narkoba.

Kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas mental juga semakin meningkat. Setidaknya di Kabupaten Malang saja pada tahun 2014 terdapat empat anak penyandang disabilitas mental yang menjadi korban kejahatan seksual, dua orang di antaranya hamil (sumber: P2TP2A Kabupaten Malang).

Untuk melindungi mereka dari tindak kekerasan tidak ada cara yang lebih efektif dibanding meningkatkan kemandirian dan kemampuan pribadi mereka. Karenanya, penyandang dissabilitas atau ABK pada umumnya, tetap harus mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka.

3. Mengapa Pendidikan Inklusi dan Bukan SLB?

Pilihan sekolah untuk ABK tentu tidak sebanyak dan sebebaskan anak biasa. Selama ini kita lebih mengenal SLB (Sekolah Luar Biasa) adalah satu-satunya alternatif pendidikan untuk mereka. Sejak tahun 1990 masyarakat mulai mengenal alternatif pendidikan lain bagi ABK, yakni Pendidikan Inklusi. ABK memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus karena mereka memiliki hambatan internal berupa fisik, kognitif dan sosial-emosional.

Sekolah Inklusi adalah sekolah reguler yang menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan menyediakan sistem pelayanan pendidikan yang disesuaikan kebutuhan peserta didik melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian dan sarana prasarana. Bila di SLB penyandang dissabilitas bersekolah secara eksklusif hanya bersama sesama penyandang dissabilitas, di sekolah inklusi mereka membaur dengan anak-anak biasa di kelas yang sama. Tentu tak semua ABK atau penyandang dissabilitas dapat belajar di sekolah inklusi. Persyaratan dasar yang harus dipenuhi adalah memiliki kemampuan kognitif untuk dapat menerima proses pembelajaran. Selebihnya, sekolah inklusi juga tetap harus melakukan proses adaptasi dalam beberapa hal. ABK belajar bersama-sama dengan anak lainnya

Proses adaptasi atau penyesuaian dilakukan pada kurikulum, proses pembelajaran, tata cara penilaian dan sarana prasarana penunjang. Misalnya untuk sarana prasarana penunjang, kelas yang menampung penyandang dissabilitas

tuna daksa, harus mensetting ruang kelas lebih mudah dilalui oleh anak dengan kruk atau dengan kursi roda. Anak-anak *low vision* (masalah penglihatan yang lemah), ditempatkan di depan. Dalam kasus tertentu, diperlukan pula guru pendamping khusus dari SLB terdekat untuk proses penyesuaian awal.

Keunggulan sekolah inklusi dibanding SLB bagi ABK dapat digambarkan sebagai berikut. *Pertama*, ABK dan anak biasa dapat berinteraksi dengan wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat. ABK akan menemui dunia nyata, tantangan hidup yang nyata yang akan dihadapinya seumur hidup. Ini akan membuat mereka lebih mandiri dan memiliki katahanan hidup cukup tinggi. *Kedua*, kebutuhan pendidikan mereka juga dapat terpenuhi sesuai dengan potensi masing-masing, baik ABK maupun anak biasa. Pendekatan yang dilakukan amat personal, sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing anak. Karenanya jumlah anak dalam satu kelas pada kelas inklusi cukup terbatas. *Ketiga*, sekolah inklusi setidaknya menjawab permasalahan akses pendidikan bagi penyandang dissabilitas. Keberadaan SLB tidak cukup banyak, dan terkadang membutuhkan biaya tambahan untuk antarjemput dan sebagainya. Bila di lingkungan terdekat terdapat sekolah inklusi, ini akan sangat membantu para penyandang dissabilitas.

4. Sekolah Inklusi: Laboratorium Kehidupan Sesungguhnya

Respon yang ditunjukkan orang tua wali murid terhadap sekolah inklusi cukup beragam. Sebagian mendukung karena menyadari manfaatnya, sebagian besar masih cenderung menolak. Penolakan itu umumnya disebabkan salah anggapan bahwa bila anak mereka belajar bersama penyandang dissabilitas di kelas inklusi, maka anak mereka akan tertinggal capaian belajarnya. Anggapan tak benar ini tentu memerlukan

upaya penyadaran bersama, sekolah inklusi tak akan pernah menghambat capaian dan target belajar bagi anak-anak biasa.

Satu hal penting yang harus dikampanyekan kepada para orang tua adalah justru dengan bersekolah di kelas inklusi, anak-anak mereka akan berada dalam laboratorium kehidupan yang sesungguhnya. Bukankah selama ini kita mengalami kesulitan dalam penanaman pendidikan karakter? Berbagai strategi yang didesain agar pembelajaran karakter muncul, tetap saja mengalami kesulitan, karena terkait dengan penanaman nilai-nilai yang tak riil.

Bagaimana mengajarkan anak-anak untuk berempati, santun, welas asih, pemurah, jujur, mandiri dan sikap-sikap terpuji lainnya dengan contoh-contoh yang 'jauh' dan kadang terkesan 'kurang nyata'. Di sinilah kelebihan kelas inklusi. Anak-anak biasa mendapatkan pembelajaran emosi-sosial-spiritual dengan berdekatan, bergaul dan membaaur dengan sesama yang kurang beruntung. Inilah yang kita sebut sebagai laboratorium kehidupan yang sesungguhnya. Bahwa hidup tak selamanya seperti yang diinginkan dan direncanakan manusia, bahwa tak semua orang beruntung memiliki fisik tanpa cacat. Anak-anak biasa akan mendapatkan contoh nyata tentang fakta kehidupan itu.

5. Kewajiban Pemerintah dalam Penyediaan Layanan Pendidikan Bagi ABK

Seluruh warga negara, utamanya anak-anak dalam usia sekolah memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan, termasuk bagi ABK. Kita perlu memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dari kewajiban negara untuk memenuhi layanan pendidikan bagi ABK, berikut ini:

- a. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak, Pasal 48 “Pemerintah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- b. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Psal 5 ayat (1) “Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Ayau (2) “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus
- c. SE Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Janurai 2003 Perihal Pendidikan Inklusi: setiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya mengembangkan 4 (empat) pendidikan inklusi yang terdiri atas SD, SMP, SMA dan SMK.

Sayangnya, belum semua daerah memiliki kepedulian untuk mengembangkan dan menyediakan sekolah inklusi, sekalipun telah jelas aturannya. Ada pula daerah yang menyelenggarakan sekolah inklusi tanpa disertai persyaratan yang memadai, sekedar memenuhi aturan dari pusat. Bahkan, ada yang masih sekedar memberikan sosialisasi saja. Beberapa daerah ada yang menyelenggarakan sekolah inklusi, tapi tanpa didasarkan pada pemetaan data ABK di sekitar sekolah tersebut. Hingga sarana prasarana penunjang belum tentu sesuai dengan jenis dissabilitas yang disandang calon siswa di sekitar sekolah tersebut. Soal data riil ABK dan jenis dissabilitasnya di tiap wilayah, memang tidak cukup tersedia. Kadang data di Dinas Sosial setempat tidak selalu diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan bersifat global, bukan data atas nama dan alamat tertentu (*by name by adress*). Ini jelas akan menyulitkan proses pemetaan kebutuhan sekolah inklusi.

6. Dukungan Masyarakat untuk Pengembangan Pendidikan Inklusi

Sekalipun menyediakan layanan pendidikan inklusi adalah kewajiban pemerintah, kita memahami benar bahwa tidak semua hal dapat kita pasrahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Selalu ada keterbatasan-keterbatasan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya. Akankah kita sebagai warga masyarakat hanya menunggu tanpa berbuat sesuatu?

Dalam konteks penyediaan sekolah inklusi, ada beberapa aktivitas positif yang bisa dikembangkan oleh masyarakat secara mandiri bersama komunitasnya. *Pertama*, membantu pendataan ABK. Dengan memanfaatkan Dasa Wisma atau pengajian agama di tiap RT dan RW, kita dapat membantu mendata jumlah dan kondisi riil ABK di lingkungan kita. Kondisi riil ini mencakup jenis disabilitas yang disandang, usia, jenis kelamin, kondisi sosial-ekonomi orang tua, dan data dasar lainnya. Data yang telah dihimpun dapat kita laporkan ke desa atau kelurahan juga ke dinas pendidikan setempat.

Kedua, menjadikan persoalan kebutuhan pendidikan ABK ini sebagai agenda yang harus dipecahkan bersama. Mungkin sekolah inklusi belum segera terpenuhi, sementara SLB juga jauh jaraknya. Tapi di lingkungan kita pasti telah ada TPQ, *majelis ta'lim*, sekolah gereja dan tempat ibadah umat beragama lainnya. Mengapa itu tidak kita manfaatkan untuk tempat belajar ABK di lingkungan kita.

Ketiga, tentu diperlukan orang-orang tertentu yang bisa menangani 'kegiatan sosial' ini. Kita dapat saja membentuk semacam pengurus, kelompok kerja atau dengan nama lain, yang bertugas mendata dan membantu kegiatan layanan untuk ABK di lingkungan kita. Akan lebih bagus lagi bila remaja dan anak-anak dilibatkan. Kita bisa menciptakan laboratorium hidup di lingkungan kita sendiri bukan?

Keempat, sekolah atau madrasah swasta yang dikelola masyarakat lewat yayasan tertentu juga dapat menginisiasi atau menyelenggarakan sekolah inklusi. Tidak harus langsung memiliki persyaratan sesuai standar ideal, semua dapat berproses, tahap demi tahap. Mungkin dapat diawali dengan menerima panyandang tuna daksa dan *low vision*, yang kebutuhannya tidak sangat spesifik. Tapi paling tidak dengan memulai, akan lebih banyak kesempatan untuk berkembang. Perlu diingat, bahwa sekolah inklusi tidak harus berarti sekolah yang mahal. Sekolah sederhana di daerah terpencil sekalipun dapat menjadi sekolah inklusi. Sebab persyaratan terpentingnya adalah penyelenggara pendidikan, baik kepala sekolah, para guru dan tenaga kependidikan lainnya, memiliki empati pada ABK.

Kelima, kita juga dapat mengorganisasikan bantuan dari perusahaan yang ada di sekitar kita. Mereka memiliki kewajiban CSR (*Coorporate Sosial Responsibility*), menyisihkan keuntungan yang mereka terima untuk melakukan layanan kepada masyarakat sekitar, termasuk untuk penyediaan layanan bagi ABK ini.

Intinya, bagaimana kita dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi ABK dan keluarganya dengan menggunakan sumber daya apa pun yang kita miliki di lingkungan kita. Warga yang berkecukupan dapat membantu dengan uangnya, tokoh masyarakat dapat membantu lewat yayasan pendidikan atau TPQ-nya, ibu-ibu Dasa Wisma dan adik-adik Karang Taruna dapat digerakkan untuk melakukan pendataan dan pendampingan, termasuk kontrol kegiatan. Ada banyak yang bisa kita lakukan, bila kita bersama-sama. Dan bukankah ini (insya Allah) bernilai ibadah yang luar biasa di mata Allah SWT?

REFLEKSi

Di setiap kegiatan pembelajaran lewat berbagai forum, di akhir sesi peserta diajak untuk merefleksi hal-hal berikut.

1. Fenomena seperti apa yang Anda dapatkan terkait penyandang disabilitas di lingkungan Anda?
2. Apakah manfaatnya bagi Anda dan keluarga dengan memahami dan membantu terlaksananya pendidikan inklusi?
3. Rancanglah design program (untuk pertemuan awal), perbaiki program (untuk pertemuan selanjutnya) untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di lingkungan Anda. Pastikan Anda memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

SADAR LAYANAN EKONOMI LOKAL DAN POTENSI ASET YANG TERSEDIA

PENGANTAR

Tujuan utama pendidikan kewargaan adalah setiap warga dapat tumbuh kesadaran akan hak dan kewajiban mereka. Melalui kesadaran ini, setiap warga akan menyadari pentingnya keaktifan mereka dalam mengupayakan terpenuhinya hak tersebut sesuai dengan aset yang mereka miliki. Selain itu, mereka juga mengetahui hak layanan yang seharusnya mereka terima, sebagai warga negara. Tulisan ini dirancang untuk menjadi bahan melaksanakan bagaimana pendidikan tersebut. Pendekatan yang dilaksanakan menggunakan *experiential learning*, sebuah proses dimana warga masyarakat belajar melalui berbagai kegiatan bersama yang sesuai dengan konteks kehidupan yang mereka jalani. Pendekatan ini juga merupakan bagian dari proses pendidikan orang dewasa (*adult education*). Dimana pendidikan dimakna sebagai kegiatan yang bersifat andragogi, tidak dimaknai sebagai pendidikan dengan sifat pedagogi. Pilihan ini atas dasar pertimbangan karena konteks pembelajaran. Bukannya untuk membuktikan kelebihan antara satu dan lainnya. Kedua-duanya memiliki relevansi yang berbeda.

Pendidikan kewargaan yang berkenaan dengan layanan ekonomi disini juga dimaknai sebagai bagian dari kegiatan pendidikan populer. Sebuah proses pendidikan yang mengutamakan timbulnya kesadaran kritis bagi warga masyarakat. Tentu kesadaran kritis yang ingin dibangun dalam hal ini adalah kesadaran sebagai warga yang aktif melakukan upaya-upaya perbaikan kehidupan berdasarkan atas segenap potensi dan kekuatan yang dimilikinya. Ini merupakan esensi utama dari pendidikan populer yang dimaksudkan dalam tulisan ini.

Proses pembelajaran oleh karena itu sedemikian rupa di upayakan adanya keterlibatan penuh warga masyarakat atau yang dikenal dengan partisipatoris. Melalui proses belajar dimana warga masyarakat yang melakukan, maka perubahan pola pikir menjadi sebuah kesadaran kritis diharapkan akan timbul. Tatkala warga menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan mereka serta kondisi lingkungan dimana mereka tinggal tidak mungkin dapat membaik tanpa usaha mereka sendiri, maka sebenarnya inilah tujuan dari mengapa diperlukan pendidikan kewargaan.

Pendidikan, oleh karenanya, dipahami sebagai sebuah proses yang membebaskan orang dari keterkungkungan budaya yang membuat mereka menjadi pasif dan menerima kenyataan hidup yang tidak menguntungkan. Pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan dimana memberikan gairah kehidupan warga masyarakat untuk berusaha, dan menyadari bahwa hanya dengan berusaha dan bekerjasama berbagai tantangan kehidupan akan dapat diatasi.

Kata kunci bagi pendidikan kewargaan berkenaan dengan layanan ekonomi masyarakat adalah bagaimana masyarakat menyadari layanan yang tersedia di desa/kampung, mengetahui yang dapat berjalan dengan baik serta faktor penyebabnya dan kemudian memanfaatkan yang ada tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat. Apa yang ada di desa/kampung utamanya difokuskan kepada layanan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada warganya.

Dari layanan yang ada tersebut warga masyarakat berkesempatan untuk membangun sebuah profil desa bersama. Sehingga kemudian semua layanan yang telah dapat diberikan dapat dipetakan dengan baik. Dari layanan yang sudah dapat berjalan baik tersebut, warga masyarakat kemudian mencoba menggali faktor apa saja sehingga layanan tersebut dapat mereka terima dengan baik. Lalu mendiskusikan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat menjadi pelajaran dan dimanfaatkan untuk mengupayakan layanan lainnya agar dapat berjalan dengan baik. Kegiatan ini dilaksanakan melalui perumusan pertanyaan yang dapat memberikan gairah kepada masyarakat untuk menggali hal-hal positif dari layanan tersebut.

Setelah mendapat gambaran yang dianggap cukup mengenai layanan ekonomi melalui pemetaan dan pembuatan arah angin, selanjutnya warga masyarakat diajak untuk memetakan manfaat yang didapatkan dari layanan tersebut. Kepada individu-individu warga masyarakat yang mendapatkan manfaat dari layanan tersebut, kemudian, disediakan sebuah tabel kesediaan dia untuk berbagi nilai kemanfaatan tersebut. Kepada siapa saja sekiranya dia bersedia untuk berbagai kemanfaatan tersebut.

Kolom berbagi dapat disediakan dan kemudian diisi sesuai dengan kerelaan warga masyarakat untuk melakukannya. Selanjutnya disediakan kolom siapa saja yang berkeinginan untuk mendapatkan nilai kemanfaatan tersebut. Tentunya warga masyarakat diajak untuk bersama-sama menyaksikan proses penulisan ini. Suasana yang penuh keakraban, dan kebersamaan harus dapat diciptakan dengan baik.

Pada saat memetakan nilai manfaat tersebut, dapat juga dibantu dengan menyediakan gambar sebuah figure manusia yang utuh setidaknya mencakup kepala, badan (hati), tangan dan kaki. Lalu difasilitasi sebuah proses dimana warga masyarakat memetakan apa saja yang dapat mereka rasakan kemanfaatan berupa pengetahuan tambahan (kepala), keinginan untuk

melakukan kebaikan (hati), dan ketrampilan (tangan atau kaki). Melalui figur ini diharapkan warga sudah mendapatkan gagasan akan apa yang DAPAT mereka lakukan atas dasar pemetaan ini.

Hasil pemetaan layanan dapat diketahui kelompok masyarakat yang selama ini kurang mendapatkan layanan dengan baik. Oleh karena itu, perlu dimusyawarahkan baik-baik hasil pemetaan ini. Hasil pemetaan selayaknya menjadi sebuah dokumen kesaksian atas apa yang terjadi di desa/kampung. Oleh karena itu harus dapat ditempatkan dengan baik. Menjadi sebuah alat untuk berdiskusi terutama tatkala proses perencanaan pembangunan dilaksanakan.

Melalui musrenbang, hasil-hasil pemetaan akan menjadi sebuah input yang sangat berguna, utamanya dalam memberikan semangat dan optimism kepada warga masyarakat bahwa peluang dan harapan akan adanya layanan yang lebih baik sangat dimungkinkan. Terutama jika hal-hal positif dari apa yang selama ini telah berjalan dengan baik di desa/kampung dapat dipetakan dan digambarkan dengan baik dan mudah dilihat dan dimanfaatkan oleh siapa saja yang terlibat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan tersebut.

TUJUAN

Tujuan Pendidikan kewargaan sadar layanan dan potensi ini adalah agar:

1. Warga memahami siapa yang sudah mendapatkan manfaat dari aset yang ada
2. Warga sadar bahwa mereka harus terlibat dalam pembuatan keputusan pemanfaatan aset desa.
3. Warga bersedia bekerjasama untuk pemanfaatan aset
4. Warga masyarakat dapat merumuskan apa yang menjadi kepedulian, harapan dan kemauan untuk bekerjasama saling membantu untuk kepentingan bersama

KATA KUNCI

1. Warga bermain arah mata angin
2. Mengupayakan melibatkan berbagai kalangan yang beragam (usia, pekerjaan, pendidikan, jenis kelamin)
3. Arah Mata Angin
4. Surga dan Bumi
5. Figur Desa/Kampung

MATERI: SADAR LAYANAN EKONOMI LOKAL DAN POTENSI ASET

Pembelajaran untuk masyarakat agar mereka sadar pemanfaatan aset untuk ekonomi adalah melalui permainan arah mata angin. Permainan ini sangat sederhana, dan harus dipahami bahwa ini merupakan sarana untuk menimbulkan kesadaran kepada masyarakat akan layanan yang diberikan oleh pemerintah lokal dan siapa saja yang telah mendapatkan manfaat.

Arah mata angin dipergunakan pada halaman kantor kepala desa. Mengapa kantor kepala desa, karena ini merupakan pusat pemberian layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga masyarakat. Tetapi, tempat berkumpul warga boleh saja ditentukan sesuai dengan kehendak warga masyarakat. Dimana tempat mereka merasa paling nyaman dalam mengutarakan, disitulah ditentukan tempat untuk permainan mata angin.

Tempat yang nyaman juga bagi seluruh rangkaian berikutnya seperti diskusi pemanfaatan hasil-hasil layanan yang sudah berjalan. Diskusi bagaimana memetakan siapa saja yang belum mendapatkan manfaat dan berkeinginan untuk mendapatkan manfaat sebagaimana tetangganya. Termasuk pemetaan surga dan dunia yang merepresentasikan apa yang diimpikan dan apa yang tersedia. Juga pemetaan kemampuan masyarakat, dalam sebuah kegiatan bersama menggambar figura desa.

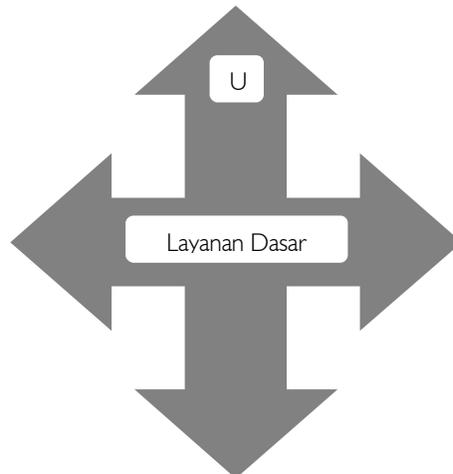
LANGKAH/PROSES KEGIATAN

1. Sepakati terlebih dahulu dengan warga masyarakat segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pemetaan layanan ini.
2. Hal yang perlu disepakati setidaknya mencakup:
 - a. Siapa saja yang diajak bermain.
 - b. Bagaimana menentukan pemain.
 - c. Waktu dan tempat melaksanakan permainan.
3. Harus difasilitasi bahwa permainan ini guna dan manfaatnya adalah untuk kepentingan kemajuan desa/kampung, tidak sekedar untuk kepentingan individu saja.
4. Permainan ini hanya sebagai sarana saja untuk timbulnya pemahaman terhadap layanan apa saja yang dapat diberikan oleh kantor desa, dan siapa saja yang telah dilayani dan yang belum, lalu layanan dimana warga masyarakat dapat berpeluang untuk memanfaatkannya.
5. Persiapan tempat dan peralatan yang mencakup:
 - a. Media yang dapat menuliskan daftar layanan (bisa kertas karton, bisa papan yang tidak terpakai, bisa papan tulis, dll).
 - b. Alat tulis (ballpoint, spidol, cat, dll)
 - c. Gambar-gambar yang bisa mewakili apa yang menjadi gagasan/ide.
6. Mulai disepakati kelompok tertentu dari masyarakat (kelompok perempuan, anak sekolah, pemuda, petani, dll) terus penulisan dan pencantuman apa saja yang ada dalam cakupan mata angin dilakukan secara bertahap, mulai dari sedikit kemudian sampai benar-benar meliputi apa yang sesungguhnya ada.
7. Setelah dianggap siap, lakukan kegiatan secara santai rileks, dan penuh dengan canda tawa. Usahakan wargalah yang

melakukan semua upaya pemetaan. Ciptakan suasana rileks dan terus menerus mengupayakan partisipasi aktif warga.

8. Di pusat arah mata angin tertulis layanan dasar. Semua layanan yang terkategori untuk memenuhi kebutuhan dan hak dasar pada dasarnya dapat berimbas kepada penguatan kemampuan warga untuk menjalankan usaha-usaha ekonomi, seperti sarana dan prasarana dasar dalam hal ini jalan, air bersih, listrik, dan lain sebagainya.
9. Warga diminta menulis kata kunci layanan di berbagai sudut arah mata angin sebagai representasi wilayah dimana mereka tinggal.
10. Warga diajak untuk bertutur dalam sebuah cerita bagaimana selama ini kehidupan mereka terbantu oleh proses pembangunan yang ada. INGAT cerita diarahkan kepada layanan yang berjalan, dan kemudian difasilitasi untuk mengungkapkan faktor-faktor kesuksesan, serta tidak lupa untuk mengidentifikasi actor yang membuat layanan tersebut dapat berjalan dengan baik. Usahakan memetakan sejauhmana keterlibatan warga masyarakat dalam ikut serta menciptakan pencapaian tujuan dalam setiap layanan yang diberikan oleh pemerintah.
11. Selanjutnya menggunakan teknik appreciative inquiry warga yang telah mendapatkan manfaat layanan tersebut diberi inspirasi untuk membantu tetangganya yang belum mendapatkan manfaat, kemudian dituliskan dalam kolom yang telah disiapkan. Proses ini mengupayakan bagaimana warga yang telah mendapatkan manfaat dari layanan untuk memikirkan tetangganya yang belum mendapatkan manfaat sebagaimana yang dirasakan. Melalui kegiatan ini, sikap saling kepedulian dan gotong royong diharapkan semakin menguat. Kolom terakhir adalah memetakan siapa saja yang berkeinginan untuk mendapatkan manfaat.

12. Tabel diberi nama yang menunjukkan semangat gotong royong dan kerjasama untuk kebaikan bersama. Kegiatan dilaksanakan secara kreatif.
13. Permainan surga dan bumi adalah untuk memfasilitasi warga menemukan dan merumuskan apa yang menjadi impian dan keinginan mereka, serta memetakan potensi yang ada, dan mencari peluang bagaimana mewujudkan impian dari yang ada. Fasilitator selayaknya menyediakan tabel dan mendiskusikan bagaimana bumi dapat menjadi tempat untuk menuju surga dengan pemanfaatan secara bersama dan berjangka panjang.



Gambar 4: Contoh Arah Mata Angin

Tabel 3: Peta Berbagi secara Gotong Royong

Manfaat bagi warga	Kemauan Berbagi	Siapa yang ingin dibagi
Pelatihan koperasi dan pendampingan usaha memberikan bekal kemampuan untuk pengelolaan koperasi dan kemampuan memanfaatkan dana untuk kepentingan bersama	Bersedia menularkan kepada tetangga yang belum ikut	Tetangga...siapa? Sebutkan nama dan apa keinginan atau harapannya

Tabel 4: Peta Surga dan Bumi

Surga	Bumi
Berisi keinginan, impian dan cita-cita	Berisi semua potensi/aset yang ada, alam, sarana fisik, cerita kesuksesan masa lalu, kegiatan yang berjalan, dana desa, program pemerintah, kemampuan individu manusia, jaringan yang ada, budaya dan nilai yang memberi semangat.

FIGUR WARGA DESA/KAMPUNG

Pengetahuan yang ada di warga masyarakat yang berguna bagi pengembangan ekonomi lokal, bisa diletakkan/ditempelkan pada kepala, mengacu kepada apa yang diketahui.

Sifat baik yang ada pada warga masyarakat yang berguna untuk saling kerjasama, pada badan/hati figure dibawah ini, yang menandakan sikap, karakteristik, dan kemauan untuk bekerjasama.

Ketrampilan yang ada di warga masyarakat yang berguna bagi pengembangan ekonomi lokal, dapat dihubungkan langsung dengan tangan yang menunjukkan kemampuan/ketrampilan apa yang dapat dilakukan.



KEGIATAN REFLEKSI

Setiap kegiatan yang dilaksanakan selama proses pendidikan selalu diikuti dengan bincang-cincang santai yang mencoba membicarakan pelajaran berharga yang dapat dipetik kaitannya dengan bagaimana warga masyarakat sadar akan layanan dasar tersebut.

Kegiatan refleksi dilalui dengan diciptakan suasana yang rileks tetapi tetap dalam nuansa pembelajaran yang serius dan khidmat. Bagaimanapun juga kegiatan ini tetap menjadi sebuah mekanisme memperkuat kesadaran yang sudah mulai timbul atas kegiatan tersebut.

KETERBUKAAN AKSES EKONOMI BAGI MASYARAKAT

PENGANTAR

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Jumlah penduduk miskin di negeri yang kaya akan sumber daya alam ini memang menjadi ironis, ibarat sebuah pepatah tikus mati dilumbung padi. Hal ini tentunya tidaklah berlebihan jika kita melihat, negara yang dikaruniai kekayaan yang melimpah, tanah yang subur akan tetapi masih banyak warga negara yang tidak berdaya secara ekonomi.

Potensi sumber daya alam yang melimpah belum sepenuhnya mampu memberikan manfaat secara ekonomi, justru dalam beberapa kasus terjadi pemiskinan akibat adanya eksploitasi sumber daya alam yang secara berlebihan karena menghilangkan sumber mata pencaharian masyarakat setempat, seperti hilangnya lahan pertanian. Pengelolaan sumber daya alam belum dikelola sesuai dengan konstitusi (UUD 1945). Pasal 33 UUD 1945 tidak dihayati dalam kebijakan ekonomi, ayat 2 pasal tersebut : “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, sementara ayat 3 : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijakan ekonomi yang ada saat ini tidak ada ketentuan yang jelas tentang cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan tidak ada kebijakan ekonomi bagi upaya pemberantasan kemiskinan dengan memanfaatkan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA). (Bambang Irawan, 2013).

Selain itu akses terhadap perekonomian lebih banyak dikuasai oleh golongan tertentu saja, sehingga jurang ketimpangan antara warga negara semakin lebar. Ketimpangan ini bisa dilihat misalnya, jumlah kekayaan 40 orang di Indonesia setara dengan kepemilikan 36 % penduduk (2013).

TUJUAN

1. Warga memiliki pemahaman dan kesadaran tentang hak terhadap akses ekonomi sebagaimana amanat konstitusi
2. Membangun kesadaran bersama bahwa penguasaan sumberdaya ekonomi secara adil akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas
3. Warga mampu mengidentifikasi asset yang dimiliki untuk membuat akses ekonomi secara mandiri

TEKNIK PENYAMPAIAN

1. Mendiskusikan secara bersama-sama problem kemiskinan yang dihadapi sehari-hari
2. Warga bercerita kisah-kisah atau pengalaman tentang usaha mengakses sumber – sumber ekonomi di wilayah mereka

PENDEKATAN DAN WAHANA

1. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada kekuatan atau asset yang dimiliki

2. Pelaksanaan dialog tentang hak akses ekonomi bagi warga untuk mendukung suatu proses perubahan di tingkat komunitas

MATERI: KETERBUKAAN AKSES EKONOMI

Lemahnya akses terhadap sumberdaya alam dan sumber ekonomi lainnya menjadi penyebab utamanya kemiskinan masyarakat. Saat ini angka kemiskinan di Indoensia masih tinggi, yakni sekitar 12 % (data Susenas, 2013). Dalam bidang pertanian, banyaknya konversi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan yang tidak terkontrol mengakibatkan akses petani terhadap lahan pertanian menjadi sulit. Akibatnya, petani berlahan sempit semakin terdesak sehingga semakin menyengsarakan rakyat yang terus-menerus mengalami proses pemiskinan.

Secara konstitusional negara memiliki tanggung jawab untuk menyejahterakan warga negara, dengan pengelolaan sumberdaya yang dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Dengan tanggungjawab konstitusional tersebut, negara melalui pemerintah seharusnya mendesain kebijakan terutama kebijakan ekonomi untuk semua golongan warga negara bukan hanya golongan tertentu saja.

Dalam Konstitusi Indonesia istilah yang dipakai untuk menggambarkan kesejahteraan sosial adalah “Adil dan Makmur”. Dengan menempatkan istilah adil dimuka menunjukkan bahwa pencapaian kesejahteraan itu harus dilakukan melalui keadilan. Konsekuensinya adalah kebijakan pembangunan sejak awal harus bertolak dari prinsip atau nilai keadilan. Hal ini nampak pada pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”. Dalam konstitusi yang sudah dihapus dalam UUD Amandemen 2002 itu, sistem usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan itu disebut sebagai Demokrasi Ekonomi yang maksudnya adalah “produksi oleh semua untuk semua” istilah “oleh semua” dalam teori ekonomi konvensional disebut juga kondisi “Full

employment” atau tingkat partisipasi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi khususnya lapangan kerja. Sedangkan istilah “untuk semua” dimaknai sebagai distribusi pendapatan dengan derajat pemerataan yang tinggi yang disebut juga sebagai egaliter. Dalam pasal 27 ayat 2 ditetapkan bahwa “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan pendapatan sesuai dengan kemanusiaan” yang sebenarnya merupakan definisi kesejahteraan sosial. (*Dawam Raharjo, 2015*).

REFLEKSI

Keterbukaan akses ekonomi merupakan landasan awal dalam membangun kesadaran bersama, bahwa warga negara memiliki hak yang sama atas distribusi sumberdaya untuk meningkatkan kesejahteraan sebagaimana amanat konstitusi. Dengan penyampaian topik ini diharapkan ada keberanian dari masyarakat untuk memulai dialog dengan pemerintah, melalui dialog inilah kemudian akan dapat ditentukan distribusi sumber daya alam dan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara luas.

Saat ini dengan adanya undang-undang desa, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menentukan rencana pembangunannya serta adanya anggaran yang cukup besar untuk mendanai pelaksanaan kewenangan, merupakan peluang bagi masyarakat untuk memperkuat akses terhadap sumberdaya ekonomi dengan jalan mendorong pengelolaan anggaran desa untuk menumbuhkan ekonomi desa dan usaha-usaha kelompok masyarakat desa sebagaimana Peraturan Menteri Desa No. 5/2015, prioritas penggunaan anggaran desa diantaranya:

1. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
2. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;

3. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi para legal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
5. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
6. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan desa dan Hutan Kemasyarakatan melalui : 1) kelompok usaha ekonomi produktif, 2) kelompok perempuan; 3) kelompok tani, 4) kelompok masyarakat miskin; 5) kelompok nelayan; 6) kelompok pengrajin; 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 8) kelompok pemuda; dan 9) kelompok lain sesuai kondisi desa.

TRANSPARANSI ANGGARAN DAN GERAKAN ANTI KORUPSI

PENGANTAR

Persoalan anggaran, terutama anggaran negara belakangan ini menjadi semakin familiar ditelinga masyarakat. Kata anggaran banyak kita dengar dan kita lihat melalui media elektronik maupun surat kabar dan berbagai media massa lainnya. Sayangnya, pemberitaan yang marak tentang anggaran lebih berbau negatif daripada positif. Kita bisa melihat diberbagai media, berita tentang korupsi anggaran baik anggaran negara (APBN) maupun anggaran daerah (APBD) yang dilakukan oleh pejabat negara dan daerah dengan berbagai modusnya, seperti pegelembungan anggaran, pemotongan anggaran, dan modus-modus lainnya. Berbagai pemberitaan negatif tersebut tidak semakin membantu publik, tetapi justru membingungkan publik.

Memahami permasalahan anggaran memang tidak mudah, karena memahami anggaran juga bukan permasalahan yang sederhana. Kebanyakan rakyat Indonesia tidak memahami apa yang dimaksud dengan anggaran itu, apalagi masalah-masalah yang terkait didalamnya. Secara sederhana, pada umumnya masyarakat memahami anggaran adalah soal uang. Dengan pemahaman yang sederhana tersebut pada akhirnya menimbulkan

presepsi atau pemahaman yang salah ketika memahami anggaran negara, bahwa anggaran negara adalah uang pemerintah dan rakyat seolah-olah tidak memiliki hak.

Menurut Mardiasmo, Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Berangkat dari konsep tersebut, anggaran negara atau APBD dapat di definisikan sebagai pernyataan mengenai estimasi pendapatan yang akan diterima dan belanja yang akan dikeluarkan selama periode tertentu. Secara spesifik dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara/daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/D).

Dari konsep diatas, dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa anggaran negara merupakan rencana pendapatan dan belanja negara atau pendapatan dan belanja daerah yang disusun dalam waktu periode satu tahun. Anggaran negara merupakan anggaran publik, karena sumber penerimaan dalam anggaran negara bersumber dari rakyat melalui pajak dan restribusi yang dipungut dari rakyat. Karena anggaran negara adalah kebijakan pengelolaan uang publik, maka dalam setiap tahapan penyusunannya wajib melibatkan rakyat atau publik. Dalam konteks demokrasi anggaran harus dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip : *Partisipatif, transparan dan akutanble*.

TUJUAN

1. Warga memahami pentingnya transparansi dan partisipasi anggaran untuk terwujudnya kebijakan yang anggaran berpihak kepada warga negara terutama warga miskin dan perempuan;

2. Warga memahami bahaya akibat korupsi dan selanjutnya memiliki kesadaran bersama untuk melawan segala bentuk korupsi dalam kehidupan sehari-hari

PENDEKATAN DAN WAHANA

Forum – forum publik yang selama ini sudah ada dan berjalan di masyarakat merupakan wahana yang dapat digunakan untuk menyampaikan pendidikan politik anggaran dan mendorong lahirnya kesadaran melawan korupsi. Komunitas-komunitas dimasyarakat seperti kelompok pengajian, jama'ah tahlil, paguyupan petani dan nelayan juga dapat menjadi wahana yang efektif untuk mendorong gerakan anti korupsi yang menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi dalam kebijakan publik khususnya kebijakan anggaran daerah dan anggaran desa.

TEKNIK PENYAMPAIAN

Dalam penyampaian tema transparansi anggaran dan membangun gerakan anti korupsi, dilakukan beberapa langkah dan teknik sebagai berikut :

1. Warga dapat bercerita tentang kondisi atau situasi pembangunan di wilayah sekitar tempat tinggal mereka, warga diajak untuk menceritakan bagaimana sebuah proyek yang di danai dari anggaran negara dijalankan.
2. Warga bertutur tentang proses pelaksanaan pembangunan, yang diawali dengan pertanyaan apakah proyek tersebut merupakan usulan warga atau kebutuhan warga, apakah ada sosialisasi tentang besaran anggaran yang digunakan, siapa yang mengerjakan dan lain-lain
3. Warga diajak untuk merefleksikan kembali tentang bagaimana pengelolaan anggaran yang tertutup akan berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui proyek-proyek pembangunan.

4. Warga mendiskusikan akibat tertutupnya informasi anggaran dapat membuka ruang terjadinya korupsi yang juga akan berakibat pada berkurangnya sumberdaya yang dinikmati oleh masyarakat termasuk masyarakat miskin dan perempuan

MATERI: TRANSPARANSI ANGGARAN DAN GERAKAN ANTI KORUPSI

1. Transparansi Anggaran

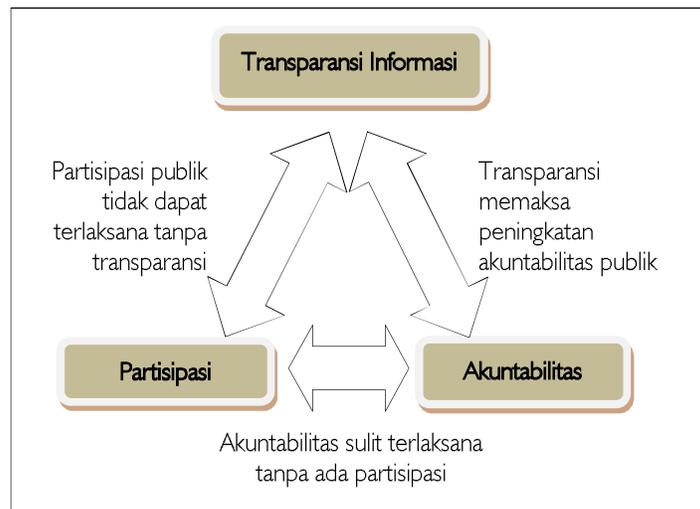
FITRA mendefinisikan transparansi anggaran sebagai upaya pemerintah dalam menyediakan dan membuka akses informasi pada setiap tahapan pengelolaan anggaran secara sistematis. Ada tiga indikator yang dapat digunakan untuk melihat transparansi pengelolaan anggaran, yaitu ketersediaan dan akses dokumen anggaran, keterbukaan proses pengelolaan anggaran, dan pelebagaan pelayanan informasi sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Keterbukaan informasi merupakan semangat global yang telah dikenal hampir diseluruh negara, termasuk di Indonesia. Hal itu tertuang dalam pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Dengan demikian, hak terhadap informasi merupakan bagian dari Hak Asasi yang dijamin konstitusi.

Dalam konteks informasi anggaran, rendahnya tingkat masyarakat melek “anggaran (*budgetliteracy*) dipengaruhi oleh “rezim tertutupan” selama ini. Bahkan hingga saat ini masih banyak aparatur pemerintah, baik ditingkat pusat atau daerah yang menganggap informasi anggaran sebagai rahasia negara

yang tidak boleh disampaikan kepada masyarakat. Asumsi lainnya menyatakan bahwa pengelolaan anggaran adalah urusan pemerintah, dan masyarakat dianggap tidak perlu mengetahui. Kalau pun masyarakat mengetahui, mereka tidak akan memahaminya.

Beberapa alasan mengapa informasi anggaran cukup penting, sebagaimana disampaikan diatas tadi bahwa secara konstitusi, informasi merupakan hak asasi. Kemudian dalam undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP yang telah diberlakukan sejak tahun 2010 lalu menjamin hak masyarakat atas informasi. Dalam UU tersebut juga mengatur mekanisme untuk memperoleh informasi, bahkan untuk mengajukan keberatan jika permintaan informasi mendapat hambatan atau kegagalan. Dengan informasi yang terbuka merupakan fondasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.



Gambar 5: Siklus Transparansi Informasi

Anggaran negara merupakan sumber daya publik bersama yang berasal dari rakyat. Melalui kebijakan alokasi anggaran, masyarakat dapat membaca arah keberpihakan pemimpin yang berkuasa dalam pemenuhan hak-hak dasar

warga, khususnya orang miskin dan kelompok perempuan. Hal inilah yang menjadikan mengapa informasi anggaran cukup penting, sebagaimana grafik diatas, selain untuk dapat memahami keperpihakan pemimpin melalui kebijakan anggaran, keterbukaan informasi anggaran akan mendorong pengelolaan anggaran negara yang akuntabel karena dengan transparansi dapat mendorong lahirnya partisipasi masyarakat untuk dapat mengontrol pengelolaan anggaran, dengan kontrol yang kuat dari publik akan mengurangi peluang-peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran negara.

Transparansi atau keterbukaan informasi anggaran negara/daerah, akan mempersempit ruang-ruang penyalahgunaan anggaran negara bahkan akan meminimalkan korupsi anggaran negara. Melalui informasi yang terbuka dan kemudahan mengakses bagi publik, maka kontrol publik terhadap kebijakan terutama kebijakan anggaran negara akan semakin kuat karena masyarakat memiliki informasi yang cukup. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menyaksikan bagaimana praktek transparansi yang dilakukan oleh Ta'mir masjid dalam hal pengelolaan dana yang masuk atau sumbangan untuk masjid. Informasi pengelolaan anggaran atau dana masjid, dilakukan dengan memasang papan informasi yang bisa dibaca oleh setiap orang atau jama'ah masjid, selain itu informasi juga melalui pengumuman yang biasanya dilakukan seminggu sekali pada hari jum'at. Informasi yang disampaikan misalnya, besarnya penerimaan dana yang diperoleh dan penggunaan anggaran termasuk sisa anggaran yang ada.

Ditingkat pemerintahan, banyak pemerintah daerah yang sudah menyampaikan informasi anggaran daerah melalui media website. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kabupaten Malang. Dalam web tersebut, publik bisa mengakses informasi anggaran mulai dari dokumen

Rancangan Anggaran dan Pendapatan Daerah (RKPD), ringkasan RKA SKPD, Ringkasan DPA SKPD, dokumen APBD, Laporan Realisasi Anggaran, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Transparansi anggaran daerah dengan kewajiban mempublikasikannya sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 188.52/-1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.

2. Membangun Gerakan Anti Korupsi

Korupsi merupakan penyakit global dan menjadi musuh bersama, karena dampak dari korupsi tidak hanya berkurangnya sumber daya publik, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan moral. Korupsi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus* yang berarti: merusak, tidak jujur, dapat disuap⁶. Menurut Bank Dunia, 2003, Korupsi diartikan sebagai pemanfaatan kekuasaan untuk mendapat keuntungan pribadi. Disini korupsi didefinisi secara luas, yang mencakup ketiga jenis unsur korupsi yang digambarkan dalam akronim yang digunakan secara luas, KKN : Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Masih berdasarkan penelitian Bank Dunia, korupsi merupakan kegagalan akuntabilitas daripada sebuah penyakit. Sedangkan menurut *Kamus Besar bahasa Indonesia*, korupsi berarti : buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan), untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

⁶ Dikutip dari buku : Fiqih anti korupsi yang ditulis PP Muhamadiyah, 2006



Gambar 6: Contoh Wahana Transparansi Anggaran

Di Indoensia Korupsi merupakan sesuatu yang sudah cukup parah, berdasarkan berbagai survey berdasarkan Coruption Perception Index (CPI) tahun 2014, Indonesia masih menempati peringkat 107 dengan skor 34, hasil indeks tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu negara terkorup di dunia. Sejak reformasi bergulir dengan ditandai runtunya rezim orde baru, persoalan korupsi tidak kunjung berhenti justru semakin merajalela dengan berbagai modus korupsi. Berdasarkan data dari Kementerian dalam negeri, lebih dari 500 pejabat baik ditingkat pusat maupun daerah menjadi tersangka dan terdakwa kasus korupsi. Hampir setiap hari kita disuguhi oleh berita tentang korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara maupun oleh sektor swasta. Perilaku korupsi, bisa terjadi dimanapun, diinstitusi pemerintahan, swasta dan bahkan institusi keagamaan, bahkan yang membuat kita miris adalah korupsi yang terkait dengan korupsi dana program dan kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan. Kasus terakhir adalah korupsi, pengadaan kitab suci, korupsi dana Haji. Pelaku korupsi juga sudah tidak lagi dilakukan oleh orang-orang biasa, tetapi juga dilakukan oleh pejabat dan orang yang bergelar haji, ustad sampai bergelar kyai.

Dalam perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah⁷, paling tidak ada tiga penyebab korupsi. *Pertama, Corruption by Greed (keserakahan)*, korupsi ini terjadi pada orang yang sebenarnya tidak butuh, tidak terdesak secara ekonomi, bahkan mungkin sudah kaya. Jabatan tinggi, gaji besar, rumah mewah, popularitas menanjak, tetapi kerakusan yang terbendung inilah yang menyebabkan terlibat dalam praktik korupsi. Bahkan hal inilah yang pernah diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa kalau saja seorang anak Adam telah memiliki dua lembah emas, iapun berkeinginan untuk mendapatkan tiga lembah emas lagi. Kasus korupsi karena keserakahan inilah yang banyak terjadi di lingkungan pejabat tinggi dan pengusaha.

Kedua, corruption by need (kebutuhan). Korupsi yang dilakukan karena keterdesakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic needs*). Misalnya, korupsi yang dilakukan seseorang yang gajinya sangat rendah jauh dibawah standart tertentu, seperti membayar SPP anaknya yang masih sekolah. Korupsi ini banyak dilakukan oleh pegawai/karyawan kecil, polisi/prajurit rendahan, buruh kasar, tukang parkir, sopir angkutan umum, dan lain-lain.

Ketiga, corruption by chance (peluang). Korupsi ini dilakukan karena adanya peluang yang besar untuk berbuat korup, peluang besar untuk cepat kaya melalui jalan pintas, peluang untuk naik jabatan secara instan, dan sebagainya. Biasanya hal ini didukung oleh lemahnya sistem organisasi, rendahnya akuntabilitas publik, longgarnya pengawasan masyarakat, dan keroposnya penegakan hukum. Yang diperarah dengan sanksi hukum yang tidak membuat jera. Dalam kenyataan sehari-hari, seringkali korupsi justru diberi kesempatan dan diberi peluang, bahkan dilindungi, sehingga menggoda para pejabat atau pemegang amanah untuk berbuat

⁷ Dikutip dari buku "Menolak Korupsi membangun kesalehan sosial", 2002 dan Fikih Anti Korupsi, 2006

korup atau menerima suap, padahal sebelumnya tidak pernah terlibat korupsi sama sekali.

Secara lebih khusus, penyebab terjadinya korupsi antara lain : *pertama*, rendahnya pengalaman nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya pendidikan agama yang terlalu menekankan aspek kognitif dan melupakan aspek afektif dan psikomotorik; atau bertambahnya ilmu pengetahuan agama tanpa dibarengi dengan peningkatan pengalaman. Ini juga menjadi titik awal perubahan nilai-nilai sosial budaya dimasyarakat yang mengarah pada pola hidup individualistik (mementingkan diri sendiri), materialistik (mengejar kebutuhan bendawi), serakah, konsumtif (boros), hedonistik (mengejar kepuasan sesaat), permisif (sikap serba boleh, tanpa peduli aturan), dan cenderung bermewah-mewahan.

Kedua, sturuktur pemerintahan atau kepemimpinan organisasi (baik profit maupun non profit) yang bersifat tertutup (tidak transparan) dan cenderung otoriter. Dalam kondisi demikian, kecenderungan terjadinya penyelewengan kekuasaan sangat tinggi. Ini menjadi lahan subur tumbunya korupsi dan suap-menyuap.

Ketiga, kurang berfungsinya lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPD, dan DPRD) sebagai kekuatan penyeimbang eksekutif (presiden, gubernur, bupati, walikota dan lain-lain). Biasanya ini diawali dengan cara yang tidak sah dalam memperoleh kekuasaan (jabatan publik) dengan money politics, manipulasi surat suara, atau politik dagang sapi. Jika rekrutmen politiknya bermasalah, maka pada gilirannya, kekuasaan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya, mengabaikan tanggung jawab sosial, serta menghalalkan segala cara.

Keempat, tidak berfungsinya lembaga pengawasan dan penegakan hukum, serta sanksi hukum tidak menjerakan bagi pelaku korupsi. Sebuah kepemimpinan atau pemerintahan

yang tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat cenderung bertindak korup (*power tends to corrupt*). Dan walaupun lembaga pengawasan telah dibentuk, tetapi jika penegak hukumnya tidak jujur, tentu tidak akan berjalan dengan baik. Begitu pula, jika pengawasan dan penegakan hukum telah berjalan dengan baik, tetapi tidak ditunjang dengan hukuman dan sanksi yang berat dan tegas, maka korupsi akan tetap berlangsung. Para koruptor merasa bahwa keuntungan korupsi lebih besar dari risiko hukumnya.

Kelima, minimnya keteladanan pemimpin atau pejabat dalam kehidupan sehari-hari. Sulit mencari pemimpin atau pejabat yang sederhana, hemat, *qona'ah* (menerima dan menikmati rahmad yang sudah ada), *wara'* (menjaga diri dari hal-hal yang remang-remang, *syubhat*), dermawan dan tidak bermental rakus. Sebaliknya, banyak pemimpin yang justru hidup bermewah-mewah, boros, pelit, sombong dan rakus. Keteladanan yang baik dari para pemimpin menjadi sangat penting, sebab masyarakat luas cenderung meniru pimpinannya. Begitu penting sebuah keteladanan, sebuah ungkapan sering dinyatakan “satu teladan yang baik lebih baik dari seribu petuah bijak”.

Membangun gerakan anti korupsi, merupakan tugas berat bagi semua kalangan. Karena memberantas korupsi tidak hanya menjadi tanggungjawab negara dan pemerintah, tetapi juga semua komponen bangsa ini.

3. Partisipasi Warga dalam Memerangi Korupsi

Sejak runtuhnya orde baru pada tahun 1998 karena gerakan reformasi dengan tuntutan mengakhiri rezim otoriter, pemerintahan yang bersih dari KKN yang juga merupakan isu utama dalam gerakan reformasi. Semangat negara dalam memerangi korupsi salah satunya diwujudkan dengan berbagai kebijakan, seperti pembentukan lembaga khusus untuk menangani kasus-kasus korupsi. Melalui undang-undang No.

22 tahun 1999 menjadi landasan kuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Lalu pertanyannya apakah korupsi menjadi berkurang? Kalau jaman orde baru korupsi hanya terjadi dilingkaran kekuasaan di Istana, akan tetapi sejak reformasi bergulir dan adanya desentralisasi atau otonomi daerah, korupsi justru menyebar ke daerah-daerah dan diberbagai institusi. Gambaran ini setidaknya terungkap dari beberapa data hasil penelitian, yang masih menunjukkan negara indonesia masih masuk kelompok besar negara terkorup.

Pemberantasan korupsi perlu dijadikan agenda bersama, mulai dari elit penguasa dan masyarakat secara luas. Akibat atau dampak korupsi telah menyebabkan terampasnya sumberdaya untuk masyarakat, sehingga kemiskinan semakin meningkat akibat sumberdaya yang ada banyak dikorupsi untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Untuk itu penting bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi, baik yang bersifat pencegahan (preventif) maupun penindakan. Pendidikan anti korupsi dan membangun kekuatan atau simpul-simpul masyarakat, perlu untuk terus didorong dan dikuatkan agar masyarakat memahami, menyadari bahaya dan dampak yang ditimbulkan oleh korupsi.

Partisipasi masyarakat tidak menjamin bahwa korupsi akan hilang 100 persen. Tetapi partisipasi masyarakat yang terorganisir pasti akan membawa perubahan besar, maka pertama dan terutama dilakukan adalah membentuk kesadaran dalam diri masyarakat bahwa mereka adalah “majikan” dan pemerintah adalah “pelayan”. Seorang majikan berhak mengetahui dan mengawasi kinerja pelayannya. Seorang majikan berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari pelayannya. Proses penyadaran ini sejalan dengan pengikisan budaya feodal.

Dalam pandangan Islam salah satu sumber korupsi adalah tidak amanahnya seorang pemimpin. Pentingnya

menjaga amanah ini, Allah SWT dalam Al-qur'an menyampaikan :

“Sesungguhnya Allah Swt menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak dan apabila kalian memerintah, maka memerintahlah berdasarkan keadilan” (Q.S. An-nisa: 58)

Keteladanan pemimpin yang amanah dan bisa menjadi contoh, bagaimana kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Begitu amanahnya sebagai seorang pemimpin, sewaktu menjabat sebagai khalifah bagaimana perhatiannya terhadap yang kecil-kecil seperti kerusakan jalan⁸. Suatu saat Ali berucap : “

Andaikata ada keledai jatuh terpeleset di salah satu jalan yang ada di Baghdad ini, aku takut kalau nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT: mengapa tak kau perbaiki jalan itu”.

Wilayah kekuasaan Islam waktu itu memang sudah sampai ke Baghdad. Banyak urusan yang harus dilakukan oleh seorang khalifah. Sebutlah, perhatian khalifah membuat sarana dan prasarana transportasi di kota Baghdad. Tetapi, haruslah khalifah wanti-wanti atas nasib terpelesetnya seekor keledai tak berharga? Itulah tanggungjawab yang begitu besar seorang khalifah Ali. Terpelesetnya seekor keledai di mata Ali bin Abi Thalib, mempunyai hubungan spiritual dan tanggungjawab moral dengan wewenang dan amanah yang diembannya sebagai khalifah. Bagi Ali, amanat dari rakyat yang didelegasikan pada pundak seorang khalifah, berarti tuntutan melakukan aktualisasi demi membangun kemaslahatan umatnya.

REFLEKSI

Kesadaran warga atas pengelolaan anggaran yang transparan akan mendorong lahirnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.

⁸ Kisah ini ditulis oleh A.S. Burhan dalam Buku “Menolak Korupsi membangun kesalehan sosial” Hal. 92-93

Meningkatnya partisipasi masyarakat akan memperkecil peluang penyalahgunaan sumber daya pembangunan (korupsi).

Dengan kesadaran bersama akan hak dan kewajiban masyarakat dalam proses kebijakan anggaran disetiap tingkatan pemerintah, maka akan meningkatkan kontrol publik terhadap pemerintah dalam merencanakan dan menjalankan pembangunan. Melalui penyampaian topik ini, paling tidak masyarakat akan memahami bahwa korupsi akan mengurangi hak masyarakat dalam pembangunan karena sumberdaya yang semestinya digunakan untuk pembangunan akan tetapi sebagian besar didigunakan untuk kepentingan pribadi.

Topik ini akan mendorong masyarakat atau warga dalam berbagai komunitas untuk secara terus menerus mendorong keterbukaan informasi anggaran baik anggaran daerah (APBD), maupun anggaran desa. Semisal masyarakat dilingkup desa bisa mendorong pemerintah desa untuk mempublikasikan informasi APBDesa diruang publik sehingga masyarakat luas bisa membaca dan mengetahui pengelolaan anggaran desa. Selain itu, kesadaran soal transparansi bisa diawali dengan komunitas-komunitas masyarakat sendiri, seperti pengelolaan organisasi dalam masyarakat secara transparan, partisipatif.

PEMILU DAN BUDAYA SENGKETA

PENGANTAR

Komnas HAM Petakan Lima Provinsi Rawan Konflik Saat Pemilu⁹

03/04/2014

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Mahkamah Konstitusi untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran tindak pidana selama Pemilu 2014 berlangsung. Dari koordinasi yang dilakukan, ada lima provinsi di Indonesia yang dinilai memiliki potensi konflik sosial yang tinggi.

“Lima wilayah yang rawan konflik itu adalah Aceh, Lampung, Papua, Papua Barat dan Sumatera Selatan,” kata anggota Komnas HAM, Natalius Pigai, saat menggelar konferensi pers terkait hasil pemantauan Komnas HAM tentang Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Pra Pemilu Legislatif 2014, di Sekretariat Komnas HAM, Rabu (2/4/2014), seperti dilansir kompas.com.

Untuk Aceh, Natalius menjelaskan, masih banyaknya kelompok intoleran membuat gesekan serta intimidasi secara fisik. Biasanya, gesekan tersebut terjadi antarpolitik lokal mau pun antara partai politik lokal dengan partai politik nasional. Ia mencontohkan, kasus penembakan terhadap posko pemenangan caleg Nasdem dan penembakan sebuah mobil yang

⁹ | <http://indonesia.ucanews.com/2014/04/03/komnas-ham-petakan-lima-provinsi-rawan-konflik-saat-pemilu> |

terdapat foto salah seorang caleg Partai Aceh beberapa waktu lalu. Padahal, mobil tersebut berisi orang-orang yang ingin berobat, bukan oleh simpatisan partai tertentu.

Sementara untuk Lampung, ia mengatakan, potensi konflik yang terjadi tidak terlepas akibat konflik agraria yang terjadi di sana. Berdasarkan catatan Komnas HAM, dari sekitar 10 ribu warga yang menempati Register 45, hanya sekitar 1.500 warga yang telah terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT).

“Pengalaman di pilukada, mereka hanya dimobilisasi untuk memilih calon tertentu. Jika tidak bisa, maka kepala desa wilayah tersebut akan dicopot dari pemerintahan,” katanya.

Adapun, untuk Papua dan Papua Barat, Natalius mengatakan, konflik yang mungkin timbul yaitu masih maraknya praktik pemilihan dengan perwakilan (sistem noken). Padahal, sistem tersebut dianggap sebagai pelanggaran HAM karena tidak dapat merepresentasikan sistem pemilihan yang mengedepankan asas *one person, one vote* dan *one value*.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Sutarman mengatakan, setiap tahapan pemilu memiliki potensi kerawanan tersendiri. Kerawanan itu akibat timbulnya rasa ketidakpuasan dari hasil pemilu, baik itu dari masyarakat, calon anggota legislatif mau pun partai politik peserta pemilu. Untuk mengantisipasi, Polri, kata Sutarman telah melakukan persiapan pengamanan pemilu. Persiapan itu mulai dari langkah preventif, preemtif hingga represif.

Polri telah memetakan daerah-daerah yang memiliki kerawanan, baik rawan sosial maupun rawan konflik. Pemetaan tersebut, berdasarkan pengalaman Polri dalam mengamankan jalannya pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah sebelumnya.

“Ada daerah yang padat penduduk yang selama ini selalu terjadi konflik saat pilukada, (seperti) Maluku, kemudian Sulawesi Selatan ada beberapa kabupaten, itu sudah kita petakan semua,” kata Sutarman.

MENGURAI PEMILU: MENGURAI RUTINITAS 'PILU'

Ilustrasi di atas adalah foto yang bisa pandangi yang mengisahkan bagaimana rata-rata Pemilu di Indonesia. Kelima

kawasan yang dimaksud di atas adalah yang paling diperhatikan, di luar kelimanya, kondisinya juga kurang-lebih sama. Jika kita ditanya, kapan terakhir kali kita merasa terkesan dengan prosesi pemilihan umum yang damai, tentram dan harmonis, maka kita akan susah menjawabnya. Hampir semua momentum Pemilu melibatkan kabar tak sedap seputar pertikaian, berita-berita yang tidak elok yang jauh dari kerukunan.

Jika kita ditanya, kenapa demikian terus terjadi di bangsa yang telah lebih setengah abad merdeka ini, maka jawabannya bisa sangat luas, spekulatif dan tidak satupun bisa menjamin menjawab anomali ini. Pemilu adalah kegiatan kebangsaan yang rutin dilakukan, namun rutin pula kita selalu prihatin dengan dampak-dampak konfrontatifnya. Sebagai bangsa, telah lama kita tidak pernah bisa melalui Pemilu sebagai sesuatu pesta demokrasi yang terasa sebagaimana benar-benar “pesta”.

Oleh karenanya, perlu dipikirkan bagaimana kita sebagai bangsa di masa mendatang bisa berkesempatan menikmati pesta demokrasi yang benar-benar damai, tentram dan berdampak pada karakter Nasional. Tujuan dari tema tulisan ini adalah untuk mengikhtiarkan cara pandang, cara tangan dan cara tindak kita sebagai bangsa melihat budaya persengkatan Pemilu sehingga bisa dimitigasi dampaknya, bisa dikembangkan nilai-nilai kemaslahatannya.

TIGA KERANGKA PEMILU Di INDONESIA

Setidaknya ada tiga pendekatan yang bisa digunakan untuk melihat Pemilu di Indonesia. *Pertama*, pemilu adalah kegiatan politik yang memiliki implikasi politik. Implikasi politik adalah akibat ikutan sebagai konsekuensi atas kekuasaan dan legalitas struktural. Artinya, setiap hasil politik berakhir pada sesuatu yang diakui oleh hukum dan akhirnya memiliki efek kekuasaan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Persoalan kekuasaan adalah persoalan purba dalam diri manusia. Pengaruh, dominasi dan anti-dominasi sudah ada sejak

manusia diciptakan. Bahkan pada kisah-kisah awal penciptaan manusia oleh Allah SWT karena alasan pengalihan kekuasaan. Manusia adalah makhluk yang akhirnya dipilih Allah untuk mewakili-Nya mengemban amanat kekuasaan-Nya agar Dunia dan alam semesta teratur sebagaimana kehendak-Nya. Dalam catatan-catatan Imam Al-Hakim al-Tirmidzi, yang diulas ulang oleh Abd al-Rahim al-Sayih dan Ahmad Abduh Iwadh, digambarkan betapa Allah dan Iblis terlibat proses dialektika yang ketat. Allah memerintahkan Iblis bersujud kepada Adam dan Iblis menolaknya. Iblis menolak perintah Allah yang menguasakan kepada Adam kekuasaan yang istimewa atasnya (Al-Tirmidzi, 2015: 69).

Di saat kekuasaan dipahami sebagai sesuatu yang sangat bernilai, maka perasaan sensitif soal “ketidakadilan” selalu dilekatkan pada prahara-prahara dalam Pemilu. Yang kalah akan mudah sekali mengobarkan isu-isu kecurangan, terjadi manipulasi, politik uang dan perkara sengketa yang lain kepada pemenang. Di seberangnya, yang menang akan mudah sekali mengklaim bahwa kemenangannya adalah sesuatu yang fair dan legal di muka hukum. Di dalam dunia Pemilu, jarang sekali ada pihak yang mengalah, legowo dan menerima hasil akhir. Meski pesan moral soal menerima kekalahan selalu dikampanyekan, faktanya moralitas itu hampir tidak pernah ditemukan.

Kedua, Pemilu adalah media perjuangan yang luhur bagi agama, kepercayaan dan sesuatu ideologi. Pendekatan kedua ini memahami bahwa melalui Pemilu lah kepentingan perjuangan yang dilandasi oleh nilai-nilai spiritual seperti keagamaan, kepercayaan dan ideologi bisa terlaksana. Banyak contoh tentang hal ini, dan kini kita masih sering mendengar betapa agama adalah salah satu yang paling populer dipakai sebagai alasan untuk memenangkan Pemilu.

Terlepas apakah agitasi perjuangan nilai keagamaan dalam Pemilu ini jujur atau tidak, ia telah menjadikan beberapa partai politik peserta Pemilu berhasil memenangkan hati dan pikiran pemilih. Agama dan nilai-nilai luhur yang lain adalah sesuatu yang

masih sangat dihargai di bumi pertiwi. Melibatkan nilai-nilai luhur ini untuk perhelatan apapun di Indonesia diyakini akan menciptakan perbedaan. Prinsip yang bisa dipahami dalam pendekatan ini adalah bahwa nilai-nilai ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia dan bertikai karena memperjuangkannya adalah sesuatu yang sangat penting.

Beberapa kejadian konfrontatif seputar Pemilu yang melibatkan sentimen keagamaan seperti yang terjadi di Jakarta, Madura dan Aceh adalah contoh nyata bahwa nilai-nilai luhur yang mustinya bisa menjadi anasir baik justru berubah menjadi ancaman. Sekali sulutan yang berbau menghasut dan memecah belah disampaikan atas nama agama, maka dampaknya akan luar biasa. Meski beberapa cerdas-pandai mengatakan bahwa pertikaian atas nama nilai agama tidak pernah benar-benar terjadi, namun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Sadar atau tidak, paham atau tidak, kelompok masyarakat akar rumput sangat rentan dan tidak memiliki ketahanan integratif jika dilanda isu agama.

Pemilu yang awalnya kegiatan politik tapi kemudian ditunggangi sentimen keagamaan akan semakin mudah memicu persengketaan horisontal. Karakter masyarakat Indonesia yang religius namun multi-segmen, sangat mudah sekali disusupi isu-isu yang bersifat memecah-belah dan memanfaatkan fanatisme. Di dalam sejarah, kejadian tipikal semacam ini telah lama berlangsung dan hingga kini tidak kunjung selesai. Hampir di semua musim Pemilu, isu ini selalu muncul dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia.

Sebut saja misalnya, pada tahun 1997, di Banjarmasin Kalimantan Selatan terjadi konflik horisontal di antara dua kubu yang berkampanye saat itu, Golkar dan PPP (Haris, 1999: 202). Konflik ini menyebar dan dikenal sebagai Jumat membara. Saat itu terjadi penjarahan besar-besaran dan ada peristiwa pembakaran aset di mana-mana. Ketika dilaporkan hasil kajiannya oleh Tim Pencari Fakta dari KOMNAS HAM yang waktu itu

dipimpin oleh Baharuddin Lopa, tidak ditemukan substansi konflik bermuatan SARA yang melibatkan agama. Namun demikian, ada pengakuan oleh pihak KOMNAS HAM, bahwa isu agama yang dihembuskan ditemukan di lapangan dan diyakini yang membuat efek yang ditimbulkan oleh konflik ini meningkat berkali-kali lipat.

Pendekatan keagamaan adalah alat analisis yang harus ada untuk melihat anatomi konflik yang menyertai sejarah Pemilu di Indonesia. Terlibat atau tidak, benar-benar terjadi atau tidak, agama dan nilai-nilai luhur yang lain seringkali diseret masuk ke kancah kepentingan politik partisipannya. Dengan demikian, melepaskan konflik horisontal Pemilu dari institusi keagamaan adalah hal yang tidak populer untuk dinamika politik dan demokratisasi di Indonesia.

Ketiga, Pemilu harus dimengerti sebagai bagian dari pemilikan aset ekonomi dan investasi. Persoalan ekonomi adalah bipolar persoalan terpenting dalam demokrasi, selain persoalan politik. Politik dan ekonomi adalah saudara kembar siam yang tidak mungkin terpisahkan. Ekonomi selali menyertai politik, demikian pula sebaliknya. Di Indonesia, dinamika politik dan ekonomi dalam Pemilu adalah rahasia umum yang semua orang bisa merasakannya. Tidak hanya di Indonesia, praktik ini juga sudah mendunia dan ditemukan di banyak negara-negara (Soros, 2007: 347).

Munculnya praktik politik uang atau *money politics* adalah bukti kuat bahwa setiap Pemilu selalu sarat dengan kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi yang dimaksud adalah kepentingan ekonomi pragmatis yang bertujuan untuk penguasaan aset oleh salah satu kelompok pengusaha tertentu, golongan tertentu atau partai tertentu. *Alih-alih* untuk kepentingan ekonomi Negara, Pemilu justru dibajak untuk menguras kas Negara ke kantong mereka-mereka yang sejak awal menyengaja menggunakan politik sebagai usaha agar kaya.

Ketika membicarakan aset, sumber penghasilan dan ladang penghidupan, manusia relatif lebih sensitif. Gesekan antar friksi

akan mudah tersulut ketika konteks mengarah pada perebutan retribusi. Situasi semacam ini lazim untuk semua kebudayaan manusia di muka Bumi. Tidak ada satu jenis kebudayaan pun yang kebal terhadap godaan ekonomi. Anehnya, di Indonesia hasrat penguasaan modal ini sering dijalankan dengan cara membungkusnya dengan kafein agama, ideologi dan politik. Meski demikian, secara sumir banyak manuver yang mengarah pada ujung ekonomi, kekuasaan kartal.

Dengan demikian, Pemilu gegabah jika tidak pernah dikaitkan dengan persoalan ekonomi. Tidak untuk sesuatu yang agitatif, melihat ekonomi di tubuh Pemilu adalah pengingat bahwa masyarakat yang memiliki riwayat persengketaan Pemilu kemungkinan memiliki keterlibatan dengan persengketaan aset ekonomi. Ekonomi menggerakkan tradisi Pemilu, sebaliknya, Pemilu juga akan menentukan distribusi ekonomi. Harapannya, menyelesaikan konflik Pemilu tidak bisa hanya menggunakan satu alat analisis saja, penggunaan analisis aset ekonomi adalah bagian penting di antara rizoma konflik yang lain.

TIGA STRATEGI UNTUK HARMONI

Kita bisa melakukan banyak hal untuk melakukan beberapa langkah-langkah mitigasi tentang ini. Langkah mitigatif berarti meminimalkan dampak jika terjadi fakta konflik, konfrontasi dan persengketaan yang menyertai Pemilu. Meski demikian, setidaknya ada tiga hal penting yang bisa kita rekomendasikan untuk ini. Ketiga hal ini adalah pendidikan yang memadai, model relasi integratif dan visi. Ketiga hal ini jika diandaikan bisa dipenuhi di tengah-tengah masyarakat, maka fenomena “Pemilu kisruh” seyogianya bisa dihindari.

Pertama, semua sepakat bahwa pendidikan adalah perihal signifikan. Pendidikan tidak selalu berkorelasi dengan kesejahteraan tetapi selalu terhubung dengan perubahan cara pandang dan pembentukan karakter. Pendidikan adalah alat yang ampuh untuk merekayasa pembentukan karakter sesuai yang

dikehendaki. Soal pendidikan ini tampaknya benar-benar disadari oleh lembaga-lembaga pemerhati Pemilu seperti salah satunya JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat). JPPR konsen pada perubahan peran masyarakat atas Pemilu, yang sebelumnya tidak tersistem dan tidak terevaluasi menjadi lebih sistematis dengan tahapan yang jelas (Hafidz, 2014: 118). Oleh karenanya benar jika dikatakan bahwa pendidikan adalah alat hegemoni, semacam alat kontrol untuk mengendalikan masyarakat.

Terlepas dari kesan hegemoni sebagai konotasi negatif, pada dasarnya di level apapun, pendidikan adalah instrumen yang penting untuk sesuatu yang bertujuan. Dengan pendidikan, masyarakat lebih mudah dimasuki, diajak kerjasama dan lebih mudah dimotivasi secara mandiri untuk mengembangkan diri. Masyarakat yang terdidik relatif bisa diajak berdialog dan relatif lebih cepat jika diminta untuk melakukan transformasi. Termasuk bagi masyarakat yang biasa terdistorsi oleh konflik akibat Pemilu, pendidikan adalah indikator penentu apakah masalah persengketaan horisontal bisa diatasi atau tidak.

Kedua, model relasi integratif adalah analisis relasi kuasa yang tidak bersifat reaktif, konfrontatif dan diametral. Selama ini paradigma aktivisme selalu dipakai untuk memfasilitasi menyelesaikan masalah. Bagi aktivisme, *legal standing* diametral yang dikembangkan adalah yang antara yang teraniaya dengan yang *dzalim*, si penganiaya. Persoalan ini telah kita idap secara kronis sebagai bangsa. Teknik fasilitasi yang cenderung lebih integratif, yang berkesatuan, tidak mempermalukan (*shaming*), tidak menunjuk muka (*naming*) dan tidak menyalahkan (*blaming*).

Fasilitasi yang memetakan antara si lemah dan si kuat telah lama dikembangkan di negara-negara periferal seperti Amerika Latin, Afrika dan Asia Tenggara seperti juga di Indonesia. Pendekatan fasilitasi semacam ini pelan-pelan harus dikurangi untuk alasan efektifitas dan efisiensi evaluasi. Dibanding harus terus konfrontatif mencari siapa kambing hitam dari setiap gejolak,

lebih baik memetakan secara keseluruhan dan merangkul pihak-pihak yang dianggap “si penganiaya” menjadi mitra aliansi. Strategi fasilitasi ini telah mulai dikembangkan di negara-negara Canada dan Australia dan menurunkan banyak sekali variasi instrumen. Jika dimanfaatkan dengan tepat, cara ini akan relatif positif memelihara persatuan dan kesatuan antar elemen.

Ketiga, Pemilu adalah alat untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan itu sendiri. Beberapa kasus tidak sedikit yang justru dimulai dari persi-tegang elit yang meneruskan ketegangan itu di level akar rumput. Ketika kasus-kasus ini dirangkum, secara umum menganggap bahwa kemenangan Pemilu adalah satu-satunya jalan perjuangan dan ketika kalah, maka itu sama dengan tertutupnya jalan. Visi yang melihat Pemilu sebagai segala-galanya ini perlu direkonstruksi menjadi lebih santai.

Kewajiban kaum cerdas pandai adalah mencari cara bagaimana Pemilu dilihat sebagai sesuatu yang lebih profan, instrumental dan hanya parsial dari sekian cara membangun kebangsaan yang bermartabat. Martabat harus dimulai dari prasyarat pendidikan masyarakat yang memadai, diteruskan dengan teknik fasilitasi yang merangkul dan diparipurnakan oleh visi yang teleologis. Adalah tanggung-jawab kita semua untuk terus mengawal demokratisasi agar makin dewasa. Semoga di masa mendatang, Pemilu tidak lagi menyisakan cerita pilu. Pemilu adalah pesta demokrasi dan dari pesta itu akan dilihat seberapa tingkat kemartabatan kita sebagai sebuah bangsa.

REFLEKSi

Konflik horisontal yang menyertai Pemilu sudah dianggap wajar, meski demikian kewajaran yang tidak sepatutnya harus sedapat mungkin dikikis. Lepas dari intervensi atau pemodelan manapun, Pemilu yang bersih, jujur, adil dan bermartabat adalah cita-cita semua Rakyat Indonesia. Pemilu yang bermartabat adalah yang dijalankan secara dewasa oleh orang-orang dewasa. Salah satu indikasi orang dewasa adalah menyelesaikan semua persoalan

dengan dialog, sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Orang dewasa tidak mudah tersulut oleh kepentingan-kepentingan sesaat yang memicu konflik horisontal.

Untuk mewujudkan budaya Pemilu yang bermartabat jelas tidak mudah. Mengingat akar sejarah konflik akibat Pemilu sudah demikian menahun dan kronis, maka mengubah segalanya dalam waktu singkat adalah mustahil. Namun patut terus diingat, bahwa kemustahilan hanya untuk cara-cara yang mudah dan instan, sebaliknya, tidak ada yang mustahil untuk mengubah segalanya dalam strategi kebudayaan yang tepat. Jika Pemilu dipandang dengan perspektif yang jernih, maka kita juga akan bisa menyelami segala problematikanya dengan jernih.

Persengketaan Pemilu di Indonesia bisa dilihat dalam konteksnya sebagai persoalan politik kekuasaan, persoalan nilai dan keagamaan serta persoalan ekonomi. Untuk menyelesaikan persengketaan dalam Pemilu, seseorang bisa mendekatinya melalui strategi pendidikan, strategi merangkul seluruh elemen dan strategi merefleksikan kembali makna Pemilu sebagai instrumen. Semoga hal-hal ini menjadi bahan permenungan bersama agar Pemilu dan demokratisasi di Indonesia semakin mantab dan kian bermartabat.

REFORMASI HUKUM DAN DISKRIMINASI PEREMPUAN DI INDONESIA

PENGANTAR

Banyak ditemukan Peraturan Daerah (Perda) yang diskriminatif terhadap perempuan, seperti Perda No.11/2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, Perda No.8/2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang, Perda tentang Larangan Keluar Malam bagi Perempuan dan aturan diskriminatif lainnya.

Di bidang politik, diskriminasi perempuan juga masih terlihat jelas, meskipun Indonesia sudah memasuki orde reformasi. Pada Pemilu 2004 – 2009, dari total 560 orang anggota DPR-RI, jumlah anggota DPR-RI perempuan hanya 11,03% atau hanya 61 orang. Pada periode 2009-2014, representasi politik perempuan meningkat sedikit, yakni 101 orang dari jumlah total 560 orang anggota DPR-RI, atau sekitar 17%. Di level provinsi, pada Pemilu 2009-2014, tingkat keterwakilan politik perempuan di legislative hanya 16% dari seluruh total anggota legislatif tingkat provinsi di seluruh Indonesia. Di level kabupaten/kota pun sama, dari total jumlah anggota DPR kabupaten/kota seluruh Indonesia sebanyak 18.857 orang, jumlah anggota DPR perempuan hanya

12%, atau 1.857 orang. Bahkan di beberapa kabupaten/kota, tingkat keterwakilan politik perempuan 0%.¹⁰

Di bidang pekerjaan, BPS mencatat 57% pekerja perempuan dipekerjakan di sektor informal. Sedangkan BAPENNAS tahun 2013 merilis, hanya 209.512 perempuan Indonesia yang memegang posisi tinggi di berbagai sektor pekerjaan. Dengan kata lain, hanya 18% dari 1,1 juta total pekerja perempuan yang bekerja di level manajerial.¹¹

Diskriminasi terhadap perempuan juga terlihat dari banyaknya perempuan yang menjadi korban kekerasan dibandingkan dengan laki-laki, baik di wilayah publik maupun domestik. Laporan Komnas Perempuan menyebutkan terdapat peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan, seperti objek eksploitasi, korban pemerkosaan, perdagangan perempuan, kekerasan oleh majikan, dll. Oleh karenanya, butuh kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

TUJUAN

Materi ini dibuat antara lain bertujuan untuk;

1. Menjelaskan bahwa reformasi hukum di Indonesia masih menyisahkan banyak persoalan, utamanya dalam aspek penegakan HAM dan isu kesetaraan gender.
2. Memetakan beberapa aturan yang tumpang tindih (*overlapping*), antara semangat Amandemen UUD 1945 dengan aturan-aturan yang ada di bawahnya.
3. Memberikan dukungan terhadap RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender untuk segera disahkan menjadi Undang-undang.

¹⁰ http://www.kompasiana.com/siprianus/diskriminasi-berbasis-gender_552dfcfd6e-a8340a118b45d6

¹¹ <http://tabloidnova.com/Karier/Pengembangan-Diri/Di-Indonesia-Diskriminasi-Perempuan-Di-Dunia-Kerja-Masih-Banyak-Terjadi>

PENDEKATAN DAN WAHANA

Reformasi hukum dalam kerangka penegakan hukum memiliki peran untuk mewujudkan masyarakat madani melalui sistem peradilan yang berbasis pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Maka, butuh suatu pendekatan yang dimulai dari tempat dimana hukum itu muncul dan bekerja, yaitu masyarakat itu sendiri. Untuk itu, pendekatan dan sarana yang pas dalam materi ini adalah;

1. Sosialisasi produk hukum
2. Workshop/Pelatihan Pendidikan Hukum berbasis Keadilan dan Kesetaraan Gender
3. Forum Musrenbang; harapannya bisa merumuskan perencanaan pembangunan berbasis keadilan dan kesetaraan gender.

TEKNIK PENYAMPAIAN

1. Tatap muka dan ceramah
Pendekatan ini muncul di awal karena berkaitan dengan penjelasan informasi tentang suatu masalah yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara
2. Dialog warga/diskusi komunitas;
Model pendekatan diskusi komunitas diharapkan bisa menyerap aspirasi dari pihak-pihak yang terkait guna mencari solusi secara damai, penuh kebudayaan, saling memahami dan penuh rasa kekeluargaan.

MATERI: REFORMASI HUKUM DAN DISKRIMINASI PEREMPUAN

Regulasi tentang kesetaraan gender di Indonesia, dimulai ketika Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms Against Women*), yang kemudian di

kenal dengan konvensi CEDAW pada tahun 1984.¹² Selain itu, Indonesia juga telah menyepakati Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (*Beijing Declaration and Platform for Action*) yang merupakan hasil konferensi perempuan se-Dunia ke-IV di Beijing tahun 1995. Komitmen Indonesia untuk meningkatkan keadilan gender juga tercantum dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dicanangkan oleh PBB dalam *Millenium Summit*, September 2010.

Keterlibatan Indonesia dalam isu keadilan gender seperti diatas, tentunya bisa dipakai sebagai payung hukum dalam implementasi kesetaraan dan keadilan gender di tingkat nasional. Namun, realitas mencatat bahwa Indonesia terlihat lambat dalam mengintegrasikan semangat keadilan gender kedalam undang-undang. Buktinya, sudah lebih dari 30 tahun semenjak Indonesia meratifikasi CEDAW tahun 1984, sampai sekarang RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender belum juga di sahkan menjadi undang-undang.

Selama ini, regulasi yang memayungi aspek keadilan gender hanya terlihat dalam Inpres No.9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional beserta Surat Keputusan Kemendagri No.132/2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaannya. Sementara payung besar yang akan dijadikan sebagai sandaran terhadap cita-cita kesetaraan dan keadilan gender belum juga ditetapkan.

Lalu, dimana letak reformasi hukum dan HAM yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita. Semenjak orde reformasi, Indonesia sudah melakukan Amandemen UUD 1945 secara bertahap. Amandemen UUD 1945 Jilid I dilakukan pada tahun 1999 dengan mengamandemen 2 pasal, Jilid II dilakukan pada tahun 2000 dengan mengamandemen 10 pasal, Amandemen ke-III pada tahun 2001, amandemen 10 pasal dan Amandemen terakhir (ke-IV) pada tahun 2002 dengan mengamandemen 10

¹² Lihat UU No.7/1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW

pasal, serta 3 pasal Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan 2 pasal.

Menurut Mahfud MD, Amandemen ke-IV UUD 1945 ini jauh lebih sempurna dari sebelumnya. UUD 1945 hasil amandemen ini memuat masalah-masalah HAM secara rinci, sehingga pelaksanaannya tidak lagi dijadikan residu kekuasaan, melainkan kekuasaanlah yang menjadi residu HAM.¹³ Semenjak Amandemen UUD 1945, kita bisa melihat, proliferasi dan peningkatan pasal-pasal yang menyangkut hak-hak sipil, hak-hak politik, maupun hak dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Untuk lebih jelasnya bisa melihat tabel di bawah ini

Tabel 5: Proliferasi Pasal-Pasal Hak Asasi Manusia Pasca Amandemen UUD 1945

Hak Sipil dan Politik	Hak Ekonomi Sosial dan Budaya
Pasal 28A dan 28I ayat (1); Hak untuk hidup	Pasal 28B ayat (1-2); Hak memiliki keturunan dan hak anak
Pasal 28D ayat (1); Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama dihadapan hukum.	Pasal 28C ayat (1-2); Hak pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan, serta hak untuk memajukan diri secara kolektif.
Pasal 28D ayat (3); Hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan.	Pasal 28D ayat (2); Hak untuk bekerja
Pasal 28D ayat (4); Hak atas status kewarganegaraan	Pasal 28E ayat (1); Hak untuk memilih pendidikan dan pengajaran
Pasal 28E ayat (1) dan 28I ayat (1); Kebebasan beragama	Pasal 28E ayat (2); Hak untuk memilih pekerjaan.
Pasal 28E ayat (3); Hak kebebasan berserikat, berkumpul,	Pasal 28H ayat (1); Hak hidup sejahtera

¹³ Mahfud MD, Makalah Seminar Konstitusi “Kontroversi Amandemen UUD 1945 dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Ketatanegaraan”, 12 April 2007

Hak Sipil dan Politik**Hak Ekonomi Sosial dan Budaya**

dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F;

Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi

Pasal 28G ayat (1);

Hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman.

Pasal 28G ayat (2);

Hak memperoleh suaka politik

Pasal 28I ayat (2);

Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif

Sumber: Amandemen UUD 1945.

Mengacu pada deskripsi tabel diatas, secara normatif, Indonesia sebenarnya sudah melakukan ikhtiar dalam reformasi di bidang hukum dan HAM. Dengan keberadaan Amandemen UUD 1945 tersebut, Indonesia memiliki payung besar yang mewadahi penegakan hukum dan HAM di masyarakat. Dari sisi negara, keberadaan amandemen UUD 1945 ini juga sebagai aturan main, karena memuat sistem pengawasan politik dan pengawasan hukum terhadap pemerintah agar tidak mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM. Namun realitasnya, masih banyak ditemukan undang-undang di bawahnya (khususnya UU dan Peraturan Daerah) yang justru kontradiktif dengan semangat Amandemen UUD 1945.

Masih banyak ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif terhadap perempuan misalnya, seperti Perda No.11/2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dan Perda No.8/2005, Perda tentang Pelarangan Pelacuran di Kota Tangerang, atau Perda

tentang Larangan Keluar Malam bagi Perempuan. Semua aturan ini justru *overlapping* dengan Amandemen UUD 1945, khususnya pasal 28I ayat (2) yang mengatur tentang hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif.

Realitas tumpang tindih aturan (*overlapping*) diatas harus diminimalisir dengan keberadaan suatu undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang relasi gender dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, agama dan budaya, dalam rangka perwujudan keadilan dan kesetaraan gender. Sudah waktunya bagi Indonesia yang meratifikasi konvensi CEDAW, 30 tahun silam, untuk lebih serius mengimplementasikan konvensi internasional tersebut kedalam aturan perundang-undangan.

REFLEKSI

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender merupakan RUU inisiatif DPR-RI periode 2009-2014 kemarin. Namun hingga saat ini, RUU tersebut tidak kunjung di sahkan menjadi Undang-Undang (UU). Padahal kalau mau serius dan konsisten, Indonesia harus memiliki aturan perundangan yang mengatur kesetaraan gender, sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).

Selama ini, aturan yang ada tidak spesifik berbunyi kesetaraan gender. Sebut misalnya UU No.23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No.10/2008 tentang Pemilu, terlihat sedikit mewakili aspek keadilan dan kesetaraan gender, sehingga diperlukan adanya aturan yang membahas secara khusus aspek keadilan dan kesetaraan gender, dalam kerangka reformasi hukum dan HAM di Indonesia.

Kalau keberadaan UU Keadilan dan Kesetaraan Gender ini bisa terwujud, kami yakin, segala bentuk diskriminasi terhadap

perempuan bisa diminimalisir. Sehingga pelaksanaan reformasi hukum dan demokratisasi di Indonesia tidak dalam menara gading.

Keadilan Sosial dan Keadilan Hukum

PENGANTAR

Kontradiksi kasus pencurian beberapa batang kayu di hutan yang dilakukan oleh nenek Asyani di Situbondo misalnya, yang di dakwa dengan Ps.12 juncto Ps.83 UU No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Kayu-kayu yg diambil nenek Asyani yg “tidak seberapa nominalnya” dan untuk menyambung kehidupan sehari-hari, jika dibanding dengan kasus-kasus korupsi yang merugikan negara sampai ratusan milyar, tentu sangat kontradiktif. Bagaimana kasus-kasus tersebut jika dikaitkan dengan rasa keadilan sosial??

Kasus pembagian BLT / raskin / pupuk subsidi, dibagikan dengan “rasa keadilan sosial”, namun dalam prakteknya bertabrakan dengan hukum. Misalnya proses pembagian tersebut tidak sesuai dengan data BPS, dll.

Kasus perselingkuhan di desa-desa, yang biasanya langsung di massa oleh masyarakat tanpa melihat aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Masyarakat merasa “menegakkan keadilan sosial” ketika berusaha menghakimi pelaku perselingkuhan. Apakah hukum membolehkan??

Kasus pemukulan massa yang dilakukan warga Kampung Melayu Jakarta Timur

Banyak kasus dan fenomena yang menggambarkan keadilan sosial itu seakan bertabrakan dengan keadilan hukum. Padahal, dua aspek itu tidak terpisah dan saling beriringan. Keadilan sosial dan keadilan hukum merupakan satu kesatuan tujuan. Keadilan sosial yang banyak bersumber dari nilai dan norma yg ada dalam masyarakat, dalam praktiknya harus tidak bertabrakan dengan aturan-aturan hukum yang sudah di rumuskan bersama. Dengan demikian, relasi antara keadilan sosial dan keadilan hukum bisa di analogikan dengan satu keping mata uang, meskipun memiliki dua sisi yang berbeda, namun dalam satu kesatuan bidang.

TUJUAN DAN TARGET

Adapun tujuan dan target perubahan yang diharapkan dari materi adalah;

1. Masyarakat bisa membedakan antara keadilan sosial dan keadilan hukum
2. Masyarakat akan mengetahui bahwa tidak semua keadilan sosial itu selaras dengan keadilan hukum.
3. Masyarakat bisa bersikap arif dan bijak dalam bersikap, selaras dengan keadilan sosial dan keadilan hukum.

PENDEKATAN DAN WAHANA

1. Majelis Taklim
2. Cangkrukan
3. Musrenbang

TEKNIK PENYAMPAIAN

1. Ilustrasi film
2. Bercerita/dongeng
3. Ceramah
4. Persuasif

MATERI: APA YANG DIMAKSUD DENGAN KEADILAN SOSIAL?

Keadilan sosial merupakan sila terakhir dalam Pancasila. Sila kelima ini harapannya adalah sebagai tujuan akhir dari semua sila lainnya. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Semua sila ini harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945 pun sama, jika kita melihat alinea IV di kata-kata terakhir, maka akan berbunyi, "... serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Supaya pemahaman kita bisa maksimal tentang keadilan sosial, tidak ada salahnya jika kita kupas dulu apa hakikat keadilan dan apa ciri keadilan. Secara umum, ada tiga ciri khas yang selalu menandai keadilan; keadilan tertuju pada orang lain, atau keadilan harus ditegakkan dan keadilan menuntut persamaan.

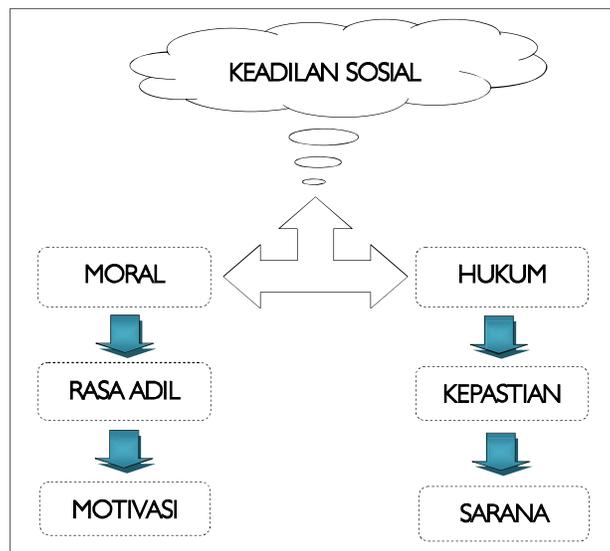
Pertama, keadilan selalu tertuju pada orang lain, artinya keadilan bukanlah merupakan suatu nilai yang harus dimiliki sendiri, melainkan keadilan juga harus ditindaklanjuti dengan "pelaksanaan aktif", dalam arti harus diwujudkan dalam relasinya dengan orang lain.¹⁴

Kedua, keadilan harus ditegakkan. Keadilan dalam konteks ini harus dilakukan. Keadilan mengikat individu sehingga individu memiliki kewajiban. Hal ini muncul karena keadilan berkaitan dengan hak yang harus dipenuhi oleh setiap insan.

¹⁴ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta; Kanisius, 2001, h.3

Ketiga, keadilan menuntut persamaan.¹⁵ Atas nama keadilan, kita harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, tanpa terkecuali.

Keadilan bukan berawal dari ketentuan yang tertulis. Ia lahir dari apa yang dirasakan oleh umat manusia. Aspek keadilan sangat erat kaitannya dengan “rasa”; yakni rasa keadilan. Rasa keadilan ini muncul karena tuntutan etika dan moral kemanusiaan, bukan berawal dari aturan hukum. Namun dalam proses menegakkan rasa keadilan, butuh sebuah kepastian dan sarana, yakni hukum dan kebijakan. Tanpa ada sarana dan kepastian (dalam hal ini aturan hukum), rasa keadilan ini menjadi susah untuk diwujudkan. Dengan demikian, hukum berusaha mempositifkan “rasa keadilan” dari apa yang menjadi tuntutan etika dan moral kemanusiaan itu kedalam aturan-aturan tertulis. Sehingga perwujudan keadilan itu bisa berjalan maksimal apabila ada rambu-rambu dan aturan hukum yang mengikat.



Gambar 7: Dimensi Perwujudan Keadilan Sosial

¹⁵ John Christman, *Social and Political Philosophy; A Contemporary Introduction* (London; Routledge, 2002), h.62

Tentunya, dalam iktiar untuk menegakkan keadilan, tetap memerlukan landasan hukum, sehingga keadilan memiliki landasan dan pijakan yang kuat. Sebaliknya, ketika harus menentukan dan membuat aturan hukum atau kebijakan, maka harus benar-benar mempertimbangkan keadilan. Itulah sebabnya, nilai-nilai keadilan sosial harus selalu menjadi pertimbangan kuat dalam merumuskan setiap kebijakan pemerintah dan pembuatan undang-undang.

REFLEKSI

1. Dalam menegakkan keadilan, membutuhkan sarana, yakni aturan hukum.
2. Rumusan aturan hukum tentunya berpijak pada nilai-nilai keadilan sosial yang ada dalam masyarakat.

“KOTA LAMBAT” DAN KEPEDULIAN LINGKUNGAN

PENGANTAR

Menanti Kehadiran “Citta Slow” di Indonesia¹⁶

Kamis, 13 Juni 2013, 07:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,

Oleh **Wibisono Bagus Nimpuno***

Perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak akan terbendung dan akan terus berkembang seiring dengan permasalahan yang dihadapi oleh bumi ini dan perubahan perilaku manusia yang diakibatkan olehnya.

Manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang akan dicapainya karena kepuasan hanya akan membuat manusia tersebut berhenti untuk berusaha. Namun, usaha tersebut jika tidak memperhatikan lingkungan sekitar akan memberi dampak negatif yang bisa berdampak panjang. Sejatinya Allah menciptakan manusia dan mengirimnya ke bumi untuk menjadi khilafah yang akan mengurus semua isi bumi dengan sebaik-baiknya.

Namun, kenyataannya bumi sekarang semakin sekarat akibat ulah manusia.

¹⁶ | <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/13/06/13/mob1hk-menanti-kehadiran-citta-slow-di-indonesia> |

Perubahan budaya dan perilaku dalam tatanan masyarakat modern perkotaan sebagai salah satu akibat cepatnya perkembangan teknologi. Masyarakat dihadapkan pada segala sesuatu yang serba cepat dan instant. Muncul istilah-istilah instant access, fast food, sosial media, dsb.

Istilah-istilah tersebut telah menjadi sebuah keseharian yang ditemui di perkotaan. Tidak hanya secara individu, perkembangan cepatnya pertumbuhan teknologi diikuti dengan cepatnya perkembangan kawasan urban, sehingga semakin sedikit tanah (ruang terbuka) yang bisa kita nikmati. Hutan-hutan beton dan aspal perlahan mulai menghiasi bumi kita, entah apakah dimasa mendatang anak cucu kita akan melihat dan mencium yang kita sebut dengan tanah.

Selama ini, indikator pertumbuhan ekonomi selalu ditunjukkan dengan pertumbuhan infrastruktur yang pesat, tidak heran kota-kota di Indonesia berlomba-lomba untuk membangun gedung pencakar langit. Kebanyakan dari pemerintah daerah berkiblat pada Jakarta yang notabene sebagai ibukota, padahal seharusnya mereka bisa lebih mengelola kearifan lokal dan menjaga lingkungan alamnya. Indonesia kaya akan budaya dan tatanan masyarakat tradisional yang memiliki harmoni dengan alam.

Konsep 'kampung' yang tidak ditemui di kota besar sebisa mungkin harus dipertahankan, jangan sampai hubungan social masyarakat yang terdapat pada konsep "perkampungan" digantikan oleh sosial media seperti yang terjadi di kota besar, dimana interaksi antar sesama hanya dilakukan melalui dunia maya. Banyak aspek-aspek lain yang bisa dijadikan indicator dalam keberhasilan pertumbuhan ekonomi, misalnya kualitas hidup masyarakat, kondisi alam, tatanan ruang dan perilaku, tingkat polusi, dsb.

Dalam membendung pesatnya arus pertumbuhan teknologi dan perkotaan, maka di Italy muncul sebuah gerakan yang bernama "Cittaslow" atau Slow City. Gerakan tersebut muncul sebagai bentuk protes terhadap masuknya restoran cepat saji (fast food) yang hadir disebuah kota di Italy. Seperti kita ketahui, makanan cepat saji memiliki dampak negatif terhadap kesehatan, sehingga mereka mengkampanyekan slow food (atau makanan rumahan). Selain penerapan slow food, citta slow yang saat itu menjadi gerakan global melawan arus globalisasi membuat kriteria-kriteria lain yang sejalan dengan visi-misi mereka, sehingga muncul istilah Cittaslow atau Slow City.

Saat ini "Cittaslow" telah menjadi organisasi International dengan beberapa Negara anggota yang menerapkan konsep tersebut, sebut saja Italia,

Inggris, Cina, Australia, Turki, dsb.

Cittaslow memiliki 50 kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi sebuah slow city. Menerapkan slowcity tidak berarti menolak penggunaan sarana teknologi dan informasi, namun, penggunaan sarana tersebut haruslah terkendali dan bijak.

Konsep cittaslow merupakan salah satu pendekatan dalam pengembangan kota yang berkelanjutan. Bagaimana dengan di Indonesia? konsep "Cittaslow" dapat diadopsi, khususnya di daerah yang memiliki struktur kota tua, seperti Semarang, Yogyakarta, Surakarta, atau di daerah yang dikelilingi oleh alam yang masih terjaga dengan baik, desa-desa adat dan kota-kota yang menjadikan sector pariwisata sebagai pendapatan daerah.

Selain itu, kota-kota yang belum memiliki potensi apapun, dengan menerapkan konsep tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa menjadi andalan dalam menggerakkan ekonomi didaerahnya. Kearifan budaya lokal dan keharmonisan dengan alam harus dijaga, tidak semua harus menjadi metropolitan dan megapolitan. Beri kesempatan anak cucu kita untuk bisa melihat alam dan kebesaran-Nya kelak.

* Mahasiswa Pascasarjana, prodi Perancangan Kota Istanbul Technical University, Turki.

KOTA SANTAI. KOTANYA MANUSIA

Apa yang berusaha ditampilkan artikel di atas mungkin belum banyak disadari publik Indonesia. Bahwa di seberang sana, di negara-negara maju Amerika dan Eropa, telah mulai dikembangkan *trend* tentang konsep 'kota lambat' atau yang lebih dikenal sebagai *slow cities* atau *cittaslow*. Konsep ini pertama kali ditemukan di Italia dan sejarah asal-muasalnya dipakai untuk melawan budaya makanan cepat saji atau *fast food*. Tidak hanya untuk melawan kuliner cepat saji yang rata-rata berasal dari kekuatan trans-nasional, konsep Italia *citta lente* juga bermaksud memproteksi budaya lokal, melindungi ekosistem lingkungan hidup dan ekonomi lokal (Knox, Mayer, 2013: 43). Gerakan ini tidak butuh waktu lama untuk diikuti, sejak pertama kali dimulai

Oktober 1999, kini lebih dari 40 kota-kota besar di dunia menjadi *follower*-nya.

Untuk menjadikan kota indikatif terhadap konsep ini, dibutuhkan 54 prasyarat yang harus dipenuhi. Prasyarat itu juga merupakan alat ukur yang dipakai oleh konsorsium kota-kota dunia untuk memutuskan apakah sebuah kota layak memberlakukan dan layak menyangand predikat *cittaslow*. Setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika sebuah kota ingin mendekati diri dengan budaya *cittaslow*. Perhatian ini sendiri pada dasarnya merupakan kualifikasi ukur yang dipakai oleh konsorsium untuk menilai dan menghargai kota-kota mana saja yang paling berhasil menerapkan budaya ini.

Sebuah kota akan dianggap layak menjadi 'kota lambat' jika memenuhi beberapa hal, di antaranya adalah:

1. Selalu memperhatikan usia lingkungan dengan cara menjaga ekosistemnya baik untuk kota itu sendiri maupun untuk keberlangsungan terjaminnya ekosistem kota-kota di sekitarnya.
2. Kota dibangun atas asas memungkinkan daur-ulang dan minim sampah yang tidak bisa didaur-ulang.
3. Semua infrastruktur dan bangunan harus melalui pengujian yang mengindikasikan bahwa ia ramah terhadap kesuburan tanah dan ramah lingkungan.
4. Memacu perkembangan teknologi yang bersifat melindungi kualitas udara, air dan penyangga kehidupan lainnya.
5. Mendukung produksi pangan organik dan mendorong konsumsi pangan organik.
6. Menjauhkan dari produk-produk yang dihasilkan oleh rekayasa genetik.
7. Membatasi kebijakan-kebijakan yang menyebabkan kesulitan inisiatif lokal di bidang bantuan finansial.

8. Melindungi produk-produk yang; memiliki akar tradisi setempat, merefleksikan kekhasan lokal dan mengindikasikan identitas kawasan.
9. Mengembangkan kesempatan pertemuan fisik antara produsen dan konsumen dalam momentum jual-beli langsung dan manual.
10. Membantu menghilangkan hambatan-hambatan infrastruktur yang menyebabkan masyarakat tidak bisa mengakses pagelaran budaya dan hiburan.
11. Memastikan bahwa seluruh warga kota sadar bahwa kota yang mereka huni menganut konsep *cittaslow* yang bertujuan untuk melindungi warisan budaya untuk anak-cucu.
12. Memacu lahirnya keramahan lokal bagi semua pendatang dan tamu yang akan berkunjung menikmati pariwisata.
13. Kota harus ikut berperan aktif untuk mengampanyekan konsep 'kota lambat' ke lingkungan, kota-kota sekitar dan ke jaringan yang lebih luas (Newman and Jennings, 2008: 197).

Melihat beberapa poin di atas, kita bisa simpulkan bahwa pada dasarnya *cittaslow* bukan semata-mata kota hibernatif yang anti terhadap kemajuan, penemuan teknologi baru dan anti kemajuan.

Gerakan *cittaslow* adalah gerakan kota yang diarahkan untuk menghindari kota-kota yang tidak pantas huni. Kota tidak pantas huni adalah yang fokus pada pengembangan infrastruktur yang hanya support terhadap industrialisasi. Kota-kota semacam ini ibarat dapur yang tidak pernah berhenti mengepul. Kota dapur yang hanya memikirkan produksi tidak akan punya waktu menikmati ruang keluarga, ruang tamu dan pekarangan. *Cittaslow* berusaha mengembalikan perikehidupan perkotaan yang utuh, sehat dan nyaman bagi semua orang.

Kota manusia adalah kota yang kritis untuk melindungi manusia sebagai manusia. Hal ini tidak aneh karena yang terjadi di

kota-kota besar membentuk manusia menjadi mesin. Terutama di kota-kota yang industrialisasi menjadi acuan utamanya, maka manusia yang terlibat bersamanya adalah komoditas, bagian dari alat produksi. Manusia yang merupakan bagian dari budaya produksi akan lebih tampak seperti mesin. Di saat manusia lebih cenderung hidup dalam ritme mesin, maka banyak keutuhan lain dalam hidupnya yang akan terenggut.

KEMUNGKINAN INISIASI CITTASLOW DI INDONESIA

Kalau diamati, kota-kota yang telah dan tampak *enjoy* dengan gerakan *cittaslow* ini adalah kota-kota kecil yang memiliki indeks solidaritas yang tinggi dari para penduduknya. Di Indonesia misalnya, kota yang berharga dengan indeks solidaritas seperti ini adalah Yogyakarta. Yogyakarta dinobatkan sebagai kota paling nyaman di antara kota-kota lain di Indonesia. Artinya, kenapa Yogyakarta nyaman, karena masyarakatnya solid untuk menciptakan rasa nyaman bersama-sama. Misalnya, jika anda pernah sesekali tidak sengaja menyenggolkan kendaraan anda ke sesama pengguna lain, asal tidak terlalu parah, maka akan dengan mudah diselesaikan dengan senyuman.

Selanjutnya, *cittaslow* juga mengandaikan warga kota yang terdidik dan terampil bekerja. Tanpa pendidikan yang baik dan terampil, usaha untuk mendukung kemajuan-kemajuan yang secara teknologi ramah terhadap lingkungan juga tidak akan berhasil. Warga yang terdidik akan selektif memilah teknologi mana yang suportif terhadap cita-cita perwujudan *cittaslow*. Yang kita lihat, warga di kota-kota besar dunia akan melahap apa saja teknologi terbaru yang dilepas di pasaran, tidak peduli apakah ia ramah lingkungan atau tidak.

Warga yang terdidik akan mudah belajar tentang teknik daur ulang dan teknologi-teknologi lain yang futuristik minim residu. Bayangkan jika kota hanya memiliki warga yang tidak punya waktu untuk menyadari bahwa daur-ulang adalah kebutuhan mendesak

dan diperlukan bagi konservasi bumi. Isu-isu lingkungan yang tidak langsung terasa dampaknya ini tidak akan mungkin dipedulikan oleh mereka yang tidak memiliki kualitas pendidikan yang baik.

Kebudayaan dan kebiasaan yang muncul dari dimensi kultural juga penting disiapkan. Cara pandang tentang kehidupan, pekerjaan dan standar hidup yang layak akan sangat menentukan kehidupan kota. Masyarakat yang standar kesuksesannya adalah rumah megah yang tidak memiliki rongga serapan, sebetapapun besar penghasilannya, akan susah sekali mewujudkan konsep *cittaslow*. Kebudayaan dan cara pandang masyarakat terhadap dunia sangat menentukan cara pandang mereka tentang tata ruang dan lingkungan sekitarnya. Di Indonesia, persoalan kebudayaan tentang ini adalah persoalan yang paling fundamental.

Rata-rata program pembangunan di kota-kota di Indonesia masih menekankan pada dinamika ekonomi. Tekanan ini secara umum tidak berakibat positif pada ekosistem lingkungan dan ekososial kemasyarakatan. Pemangku kebijakan di perkotaan masih sedikit yang melibatkan sustainabilitas lingkungan dalam kebijakan pembangunannya. Di antara kota-kota yang tidak sedikit itu taruhlah hanya Bandung dan Surabaya yang menuju ke sana. Kebijakan yang tidak aktif mengedukasi ini menjadikan masyarakat perkotaan mengikuti hal yang sama, di antara mereka masih sedikit sekali yang memiliki kebiasaan baik hidup ramah lingkungan.

Problem sampah, pemanfaatan lahan, polusi transportasi dan industri, pola konsumsi, etos kerja serta budaya individualistik masih menjadi tembok besar bagi pewujudan konsep *cittaslow* di kota-kota Indonesia. Betapa susah sekali membayangkan ada satu kota dengan masyarakatnya yang sedemikian rupa bisa menahan diri untuk tidak menggunakan transportasi pribadi bermotor dan mampu menahan diri untuk tidak ikut dalam pola konsumsi makanan cepat saji.

Perasaan kompak dan solid, mau tidak mau harus menjadi landasan untuk membuat warga perkotaan semakin peduli dengan kenyamanan tempat tinggal. Solidaritas ini akan susah terbentuk jika pendidikan tidak berhasil mengubah pola pikir masyarakat terhadap keutuhan lingkungan hidup dan keberlangsungan tradisi lokal. Akhirnya, jika solidaritas dan pendidikan ini berhasil dijadikan wahana untuk sampai pada kebudayaan masyarakat kota yang 'lambat', maka tata kota yang manusiawi dan ramah lingkungan akan bisa sama-sama kita nikmati di Indonesia. Kota-kota penting yang identik dengan semangat ini seperti Bandung, Yogyakarta dan Surabaya bisa menjadi model untuk memberi contoh kepada kota-kota yang lain.

REFLEKSi

Cittaslow adalah gerakan tata-kelola kota yang baik dan telah mendunia. Maksud gerakan ini adalah untuk menjadikan kota sebagai pusat peradaban yang tidak menjadikan warga kotanya ibarat mayat hidup atau robot. Seperti mayat hidup karena mereka hidup dalam lingkungan yang tidak pantas, tidak layak dan polutif. Seperti robot karena manusia-manusia di dalamnya hanya dikendalikan oleh pola produksi dan dinamika ekonomi yang kapitalistik. *Cittaslow* menyediakan gaya baru dalam menjalankan kehidupan di perkotaan dengan cara-cara yang lebih cerdas, berwawasan lingkungan dan dekat dengan makna kebahagiaan.

Titik tekan *cittaslow* yang ada pada konservasi lingkungan, pemanfaatan teknologi daur-ulang, keberpihakan pada sistem kebijakan yang membahagiakan serta bersifat peduli terhadap warisan leluhur, pada dasarnya sinergis dengan amanat pembangunan Nasional. Amanat pembangunan Nasional Indonesia adalah membangun manusia seutuhnya. *Cittaslow* menyediakan semua impian itu dalam sebuah trend gaya pengelolaan kota yang ramah, sehat dan bahagia. Melalui gerakan 'lambat'nya, *cittaslow* mengajak semua orang agar semakin cermat hidup di bumi.

Banyak hal-hal di luar pertimbangan baik yang sepanjang sejarah dilakukan manusia bumi. Isu tentang degradasi lingkungan, pemanasan global, variasi jumlah penyakit, harapan hidup dan isu-isu lingkungan yang lain adalah bukti bahwa selama ini manusia-manusia terlalu cepat bergerak dan tidak punya kesempatan untuk merefleksikan diri. Demikian ini pula yang terjadi di kita, masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara berkembang yang hampir seluruh denyut nadinya ditujukan untuk berkembang. Dan ketika perhatian ini hanya untuk perkembangan, maka waktu untuk merenung atas perikehidupan yang lebih baik pun akan susah terwujud.

Meski demikian, ada harapan di masa mendatang untuk menampilkan satu atau dua model kota yang cerdas, yang tatakelolanya dilandaskan pada kebijakan dan kebudayaan yang cerdas. Kota-kota seperti Bandung, Yogyakarta dan Surabaya semoga menjadi pelopor akan harapan baru akan perwujudan *trend* kota 'lambat' ini. Adanya kota lambat akan menginspirasi banyak pihak dan secara tidak langsung akan mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terdidik, memiliki harapan yang lebih baik dan sarat akan makna-makna kebahagiaan. Semoga *cittaslow* hinggap dan dipakai menjadi gerakan di Indonesia.

DAFTAR BACAAN

- Al-Tirmidzi, Al-Hakim. *Menyibak Tabir*, Ed. Abd al-Rahim Sayih dan Ahmad Abduh Iwadh, Penerbit Serambi, Jakarta, 2005.
- Ata Ujan, Andre. *Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Azra, Azyumardi. "Masalah dan Kebijakan Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah." Makalah disampaikan pada *Konferensi Nasional Manajemen Pendidikan* di Hotel Indonesia. Jakarta: 8-10 Agustus 2002.
- Christman, John. *Social and Political Philosophy; A Contemporary Introduction*. London; Routledge, 2002.
- Hafidz, Masykurudin. *Bersama Masyarakat Memantau Pemilu 2014*. Jakarta: Digital Lines Distributor, 2014.
- Haris, Syamsuddin, et.al. *Kecurangan dan Perlawanan Rakyat dalam Pemilu 1997*. Jakarta: Yayasan Obor, 1999.
- <http://indonesia.ucanews.com/2014/04/03/komnas-ham-petakan-lima-provinsi-rawan-konflik-saat-pemilu> |

<http://tabloidnova.com/Karier/Pengembangan-Diri/Di-Indonesia-Diskriminasi-Perempuan-Di-Dunia-Kerja-Masih-Banyak-Terjadi>

http://www.kompasiana.com/siprianus/diskriminasi-berbasis-gender_552dfcf6ea8340a118b45d6

<http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/13/06/13/mob1hk-menanti-kehadiran-citta-slow-di-indonesia>

<http://www.sayapbarat.wordpress.com/2007/08/29/masalah-pendidikan-di-indonesia>.

Kartono, Kartini. *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik dan Sugesti*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

Knox, Paul and Heike Mayer. *Small Town Sustainability*. Basel: Birkhauser Verlag GmbH, 2013.

MD, Mahfud. Makalah Seminar Konstitusi “Kontroversi Amandemen UUD 1945 dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Ketatanegaraan”, 12 April 2007.

Naskah RUU Keadilan & Kesetaraan Gender

Newman, Peter dan Isabella Jennings. *Cities as Sustainable Ecosystems*. Washington DC: Island Press, 2008.

Pidarta, Made. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

PP. Muhammadiyah. *Fiqih anti korupsi*. Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2006.

Sihombing, Umberto. “Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat.” dalam Jalal dan Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.

- Soros, George. *Open Society; Reforming Global Capitalism*, ed. Umar Basalim. Jakarta: Yayasan Obor, 2007.
- Suyata, *Community Participation in School Development: Acces, Demand, and School Contruction*. Jakarta: Directorate General of Primary and Secondary Education, Ministry of Education and Culture 1996.
- UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No.10/2008 tentang Pemilu
- UU No.21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak
- UU No.23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
- UU No.7/1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW
- Wijaya, Agung. *Konsep, Pola, dan Metode Pendidikan Kewarganegaraan*. Makasar: Ppt. 7 Mei 2012.

